

Katalog: 4102004.82
ISSN 2460-7495

Indikator Kesejahteraan Rakyat

PROVINSI MALUKU UTARA

Volume 9, 2023

2023



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA

<https://malut.bps.go.id>

Indikator Kesejahteraan Rakyat

PROVINSI MALUKU UTARA

2023

Volume 9, 2023



Indikator Kesejahteraan Rakyat Maluku Utara 2023

Volume 9, 2023

Katalog	: 4102004.82
ISSN	: 2460-7495
Nomor Publikasi	: 82000.2331
Ukuran Buku	: 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman	: xvi + 107 halaman
Penyunting Naskah	: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
Pembuat Kover	: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara
Diterbitkan oleh	: © BPS Provinsi Maluku Utara
Sumber Ilustrasi	: www.freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Maluku Utara

TIM PENYUSUN

Indikator Kesejahteraan Rakyat Maluku Utara 2023

Volume 9, 2023

Penanggung Jawab Umum

Aidil Adha, S.E., M.E.

Penyunting

Soraya Diana Uli, S ST

Mutia Elyani, S.Tr.Stat

Penulis

Nida'Ul Hanifah, S ST

Mochammad Alwan S.Tr.Stat

Pengolah Data

Nida'Ul Hanifah, S ST

Mochammad Alwan S.Tr.Stat

Desain dan Tata Letak Layout

Nida'Ul Hanifah, S ST

Mochammad Alwan S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2023 merupakan publikasi tahunan BPS Provinsi Maluku Utara yang menyajikan data mengenai tingkat kesejahteraan rakyat Maluku Utara antar kabupaten/kota dan tipe daerah. Data utama yang digunakan bersumber dari Proyeksi Penduduk Maluku Utara 2010-2035, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Maluku Utara Dalam Angka 2023.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Pada tahun 2023 publikasi ini menambahkan penyajian topik khusus yaitu Capaian Indikator Makro dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengangguran di Maluku Utara. Dianalisis juga bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Ternate, November 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara



Aidil Adha, SE ME

DAFTAR ISI

Indikator Kesejahteraan Rakyat Maluku Utara 2023

Volume 9, 2023

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Singkatan dan Akronim.....	xv
1. Bab I. Pendahuluan	1
2. Bab II. Profil Ketenagakerjaan di Maluku Utara	7
3. Bab III. Capaian Indikator Makro di Maluku Utara.....	21
4. Bab IV. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Provinsi Maluku Utara	31
5. Bab V. Perkembangan Kesejahteraan Rakyat	43
Daftar Pustaka.....	93
Lampiran.....	95
Istilah Teknis.....	103
Sumber Data	107

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel <i>cross section effect</i> masing-masing Kabupaten/Kota di Maluku Utara berdasarkan <i>fixed effect model</i>	38
Tabel 4.2 Tabel matriks korelasi Variabel IPM, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan PDRB Maluku Utara	41
Tabel 5.1 Kepadatan Penduduk, Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2022	47
Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Tipe Daerah di Maluku Utara (Rupiah), 2022	70
Tabel 5.3 Rata-rata Konsumsi Kalori (kkal) dan Protein (gram) per Kapita per Hari Menurut Tipe Daerah di Maluku Utara, 2021 – 2022	74
Tabel 5.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2021–2022	76
Tabel 5.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2021–2022	77
Tabel 5.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2021–2022.	78
Tabel 5.7 Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi, 2021–2022	90
Tabel 5.8 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir, 2021–2022.	91
Tabel 5.9 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan, 2021–2022.	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2017-2022 (Persen)	4
Gambar 2.1	Persentase Penduduk Menurut Usia Kerja di Maluku Utara, 2022	9
Gambar 2.2	Rasio Ketergantungan di Maluku Utara, 2017-2022	10
Gambar 2.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Maluku Utara, 2020-2022	11
Gambar 2.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022.	12
Gambar 2.5	Jumlah Penduduk yang Bekerja di Maluku Utara, 2020-2022	13
Gambar 2.6	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2021-2022	13
Gambar 2.7	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022.	14
Gambar 2.8	Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Provinsi Maluku Utara, 2020-2022 (Persen).	15
Gambar 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka di Maluku Utara, 2020– 2022.	16
Gambar 2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022	17
Gambar 2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tipe Wilayah di Maluku Utara, 2020 – 2022	17
Gambar 2.12	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara, 2020 – 2022.	18
Gambar 2.13	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Maluku Utara, 2022.	19
Gambar 3.1	Jumlah Penduduk Maluku Utara, 2018-2022 (jiwa)	24
Gambar 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022 (ribu jiwa).	25
Gambar 3.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku Utara, 2020-2022	26
Gambar 3.4	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku Utara, 2020-2022	27
Gambar 3.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara, 2018-2022 (Persen)	28
Gambar 3.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022 (Persen).	29
Gambar 4.1	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2010-2021 (Persen).	34
Gambar 4.2	Histogram residual berdasarkan model terpilih <i>fixed effect model</i>	40
Gambar 5.1	Jumlah Penduduk Maluku Utara Tahun 2021 dan 2022 (Juta Jiwa)	45

Gambar 5.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2021–2022	46
Gambar 5.3	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2022	48
Gambar 5.4	Umur Harapan Hidup (UHH) Maluku Utara dan Indonesia, 2018–2022	49
Gambar 5.5	Persentase Anak Usia 0-23 Bulan yang Pernah Diberi ASI Selama Sehari Kemarin Menurut Kabupaten/Kota, 2022.....	50
Gambar 5.6	Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Maluku Utara Tahun 2018–2023	54
Gambar 5.7	Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Maluku Utara Tahun 2018–2023.....	55
Gambar 5.8	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah STTB Tertinggi yang Dimiliki di Maluku Utara 2022	56
Gambar 5.9	Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Maluku Utara, Agustus 2020–2023	58
Gambar 5.10	Jumlah Penduduk Bekerja dan Pengangguran Maluku Utara, Agustus 2019–2023	58
Gambar 5.11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tipe Daerah di Maluku Utara, Agustus 2021–2023	59
Gambar 5.12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara, Agustus 2021–2023	60
Gambar 5.13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tipe Daerah di Maluku Utara, Agustus 2021–2023	60
Gambar 5.14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara, Agustus 2021–2023	62
Gambar 5.15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Maluku Utara, Agustus 2022–2023	63
Gambar 5.16	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan di Maluku Utara Agustus 2023	64
Gambar 5.17	Struktur Lapangan Usaha Penduduk Bekerja di Maluku Utara	Berdasarkan Tipe Daerah, Agustus 2023.....
Gambar 5.18	Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Maluku Utara, Agustus 2023	66
Gambar 5.19	Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Maluku Utara Menurut Tipe Daerah, Agustus 2023	66
Gambar 5.20	Persentase Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja sebagai Buruh/karyawan/Pegawai menurut Kabupaten Kota di Maluku Utara, Agustus 2023	67
Gambar 5.21	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Seluruhnya di Maluku Utara, Agustus 2023	69

Gambar 5.22	Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran, 2022	71
Gambar 5.23	Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, 2022	72
Gambar 5.24	Indeks Gini Maluku Utara, 2018 – 2022	73
Gambar 5.25	Persentase Penduduk Miskin di Maluku Utara, 2018–2022 (Maret)..	80
Gambar 5.26	Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di Maluku Utara, 2020-2022 (Ribu Rupiah/Kapita/Bulan)	81
Gambar 5.27	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Tipe Daerah di Maluku Utara, 2018–2022	82
Gambar 5.28	Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Menurut Tipe Daerah di Maluku Utara, 2018–2022	83
Gambar 5.29	Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Maluku Utara, 2021–2022 ...	84
Gambar 5.30	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Maluku Utara Tahun 2022	85
Gambar 5.31	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Maluku Utara, 2022	86
Gambar 5.32	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Bidang Pekerjaan di Maluku Utara 2022	87
Gambar 5.33	Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Air Layak di Maluku Utara Tahun 2022	88
Gambar 5.34	Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Jamban Milik Sendiri/Bersama di Maluku Utara Tahun 2022	88

SINGKATAN DAN AKRONIM

APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
ASI	: Air Susu Ibu
BPS	: Badan Pusat Statistik
D1/D2/D3	: Diploma 1/ Diploma 2 / Diploma3
K	: Perkotaan
D	: Perdesaan
K + D	: Perkotaan + Perdesaan
L	: Laki-laki
P	: Perempuan
L+P	: Laki-laki + Perempuan
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	: Puskesmas Pembantu
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
Sakernas	: Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SM	: Sekolah Menengah
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMLB	: Sekolah Menengah Luar Biasa
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	: Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SP	: Sensus Penduduk
Susenas	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
Wajar	: Wajib Belajar

PENDAHULUAN

<https://malut.pps.go.id>

1

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat. Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara atau daerah adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor penting bagi proses produksi, karena dapat menciptakan suatu nilai tambah. Tenaga kerja yang melimpah harus diimbangi dengan kualitas yang baik agar mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Kurangnya kualitas sumber daya manusia sering kali menjadi masalah dalam hal penciptaan tenaga kerja yang berdaya saing.

Salah satu tujuan pembangunan adalah mengurangi angka pengangguran. Penyebab utama pengangguran adalah tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Tingginya jumlah angkatan kerja baru yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja hanya akan menambah jumlah angkatan kerja di suatu wilayah. Angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik dapat memberikan kontribusi yang besar pula pada perekonomian suatu wilayah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut dapat dicapai ketika seluruh angkatan kerja yang ada dapat terserap oleh pasar tenaga kerja.

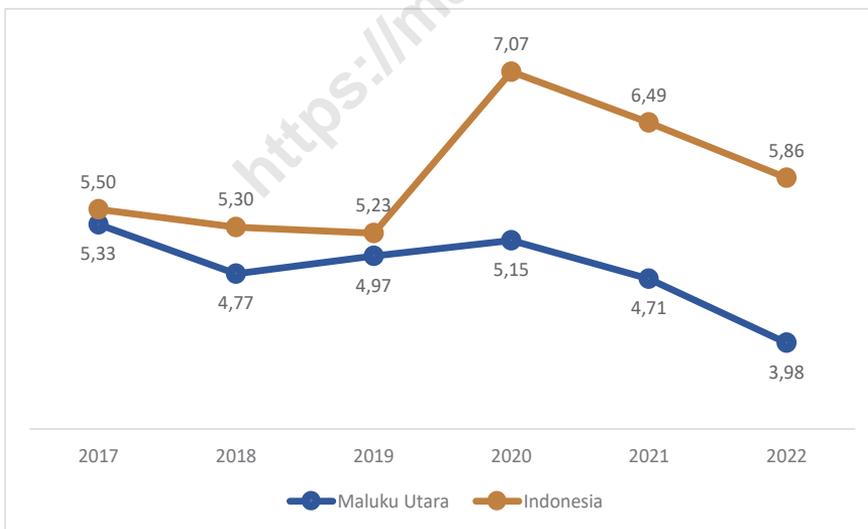
Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan baik di bidang ekonomi maupun sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah. TPT menunjukkan persediaan (*supply*) tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah.

kerja. Semakin tinggi nilai indikator ini, artinya, semakin banyak pula persediaan tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2017-2022, perkembangan indikator TPT di Indonesia menunjukkan pola yang berfluktuasi dengan kecenderungan menurun meskipun sempat mengalami peningkatan tajam pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Besarnya TPT bervariasi antara tiga sampai tujuh persen tergantung dari kondisi perekonomian sepanjang waktu. Secara umum, pola TPT di Provinsi Maluku Utara selama periode Agustus 2017-2022 berada di bawah rata-rata angka Nasional. Hal ini merupakan sinyal positif bagi pembangunan ekonomi Maluku Utara. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam faktor yang mempengaruhi pengangguran di Maluku Utara. Kajian disajikan melalui analisis tematik Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Maluku Utara, yang merupakan analisis tematik dari publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2023.



GAMBAR 1.1
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2017-2022 (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017-2022

1.2 Tujuan

Tujuan dari Analisis Tematik Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara adalah untuk memberikan gambaran tentang perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Maluku Utara. Selain itu, analisis ini juga menggambarkan tentang kondisi dari faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran di Maluku Utara antara lain pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Analisis ini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi mengenai kondisi kesejahteraan rakyat khususnya dalam bidang ketenagakerjaan sehingga dapat menjadi acuan dalam pembentukan program pembangunan yang akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain analisis ketenagakerjaan dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat pengangguran terbuka, publikasi ini juga menyajikan perkembangan kesejahteraan rakyat antar waktu secara umum.

1.3 Ruang Lingkup

Analisis tingkat pengangguran terbuka ini menyajikan data dan informasi terkait keadaan ketenagakerjaan di Maluku Utara selama tahun 2017 – 2022. Data dan informasi yang disajikan pada analisis ini menggambarkan kondisi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

1.4 Sumber Data

Sumber data dalam analisis tematik faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Maluku Utara bersumber dari Badan Pusat Statistik, yaitu dari publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk (SP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka di Maluku Utara, diawali dengan Bab 1 (Pendahuluan) yang membahas latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sumber

data yang digunakan dalam analisis, dan sistematika penulisan. Bab 2 membahas perkembangan ketenagakerjaan di Maluku Utara dan diikuti Bab 3 membahas tentang perkembangan faktor faktor yang mempengaruhi pengangguran SMK meliputi : IPM, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya Bab 4 membahas terkait faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara. Sebagai penutup, Bab 5 membahas mengenai perkembangan kesejahteraan rakyat secara umum dalam hal kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta ketimpangan dan kemiskinan.

<https://malut.bps.go.id>

Profil Ketenagakerjaan Di Maluku Utara

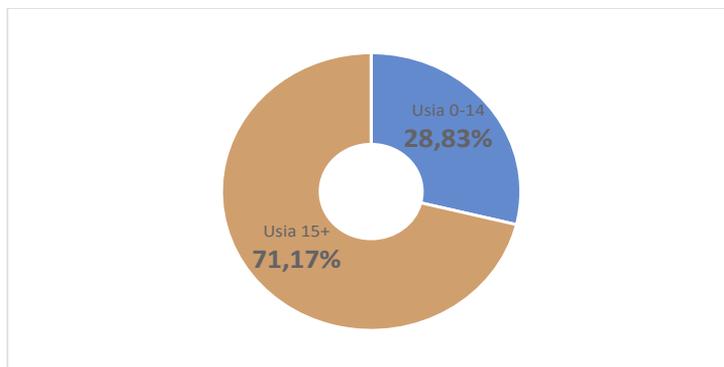
2

Salah satu faktor produksi dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa adalah tenaga kerja. Faktor tenaga kerja dapat menggambarkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan suatu wilayah. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja untuk dapat memproduksi barang dan jasa yang berkualitas baik sehingga memiliki nilai balas jasa yang tinggi pula. Karena itu, dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu wilayah, dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas.

Data ketenagakerjaan merupakan kajian yang menarik untuk dibahas, karena peranan tenaga kerja yang begitu besar dalam perekonomian di suatu wilayah. Data-data terkait ketenagakerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS setiap tahun.

2.1 Penduduk Usia Kerja

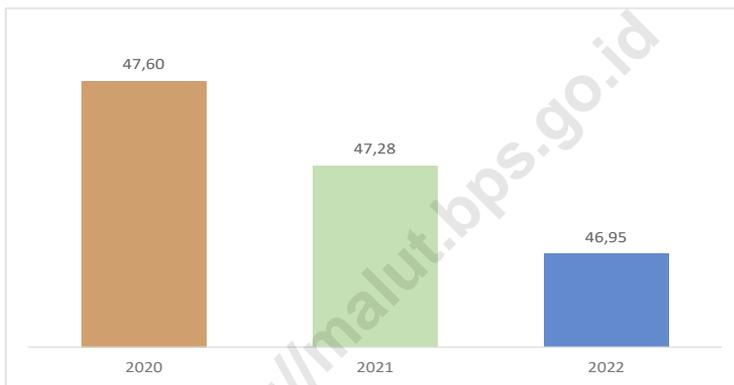
Penduduk dalam ketenagakerjaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Sementara penduduk bukan usia kerja adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2022, lebih dari 70 persen penduduk Maluku Utara merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang merupakan penduduk usia kerja. Sementara sisanya sebesar 28,83 persen merupakan penduduk bukan usia kerja.



GAMBAR 2.1
Persentase Penduduk Menurut Usia Kerja di Maluku Utara, 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022

Perbandingan antara penduduk usia non produktif dan penduduk usia produktif dituangkan dalam indikator rasio ketergantungan. Indikator ini menunjukkan banyaknya penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan di Maluku Utara tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan penurunan, dengan nilai setiap tahun berturut-turut yaitu 47,60 persen; 47,28 persen; dan 46,95 persen di tahun 2022. Artinya setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang yang belum produktif atau tidak produktif lagi di tahun 2022.



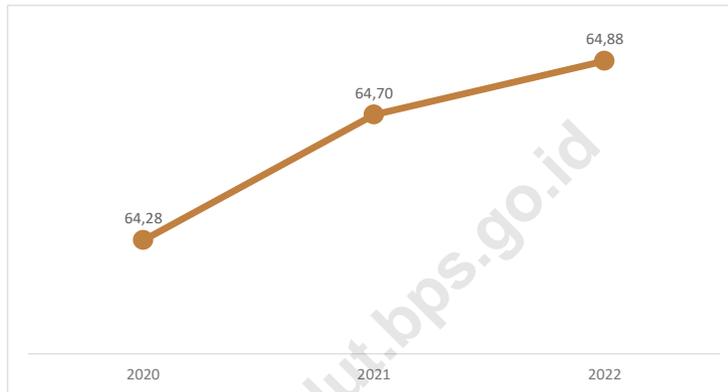
GAMBAR 2.2
Rasio Ketergantungan di Maluku Utara, 2017-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara

2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, dari 938,97 ribu penduduk usia kerja di Maluku Utara tahun 2022, terdapat sebanyak 609,24 ribu penduduk yang merupakan angkatan kerja, dan 329,73 ribu penduduk bukan angkatan kerja.

Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja merupakan penduduk yang secara aktif berkontribusi dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Salah satu indikator yang dapat melihat seberapa besar penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu wilayah adalah indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.



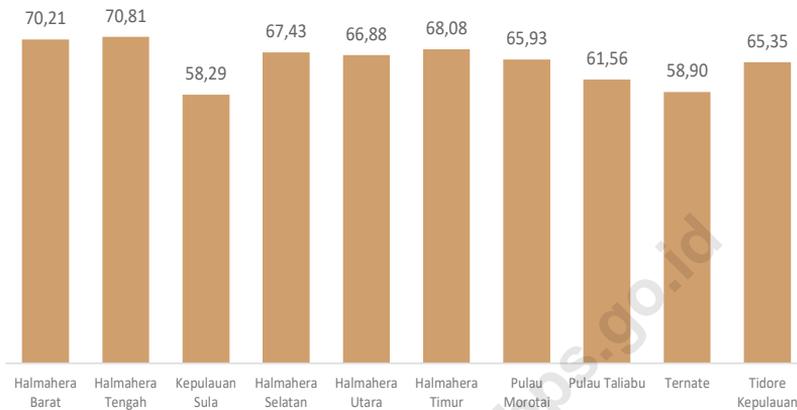
GAMBAR 2.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Maluku Utara, 2020-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022

TPAK di Maluku Utara mengalami peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan 2020, yaitu dari 64,28 persen menjadi 64,70 persen. Di tahun 2022, TPAK kembali meningkat menjadi 64,88 persen. Meningkatnya TPAK selama periode tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan adanya peningkatan pasokan tenaga kerja dalam pemulihan ekonomi setelah adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Berdasarkan kabupaten/kota di Maluku Utara, TPAK tahun 2022 berkisar antara 58,29 persen hingga 70,81 persen. Kabupaten dengan TPAK tertinggi adalah Kabupaten Halmahera Tengah dengan TPAK sebesar 70,81 persen. Hal ini menunjukkan banyaknya pasokan tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Halmahera Tengah. Jika dapat dikelola secara optimal, tingginya TPAK ini dapat menjadi pendorong dalam percepatan aktivitas perekonomian. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Sula memiliki TPAK terendah dengan sebesar 58,29 persen. Besarnya TPAK harus diiringi dengan banyaknya kesempatan kerja yang tersedia.

Jika banyak penduduk angkatan kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja, kegiatan perekonomian akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

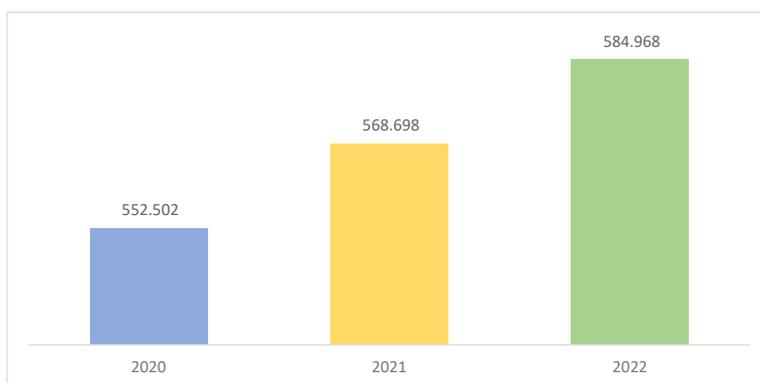


GAMBAR 2.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022

Sumber : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022

2.3 Penduduk Bekerja

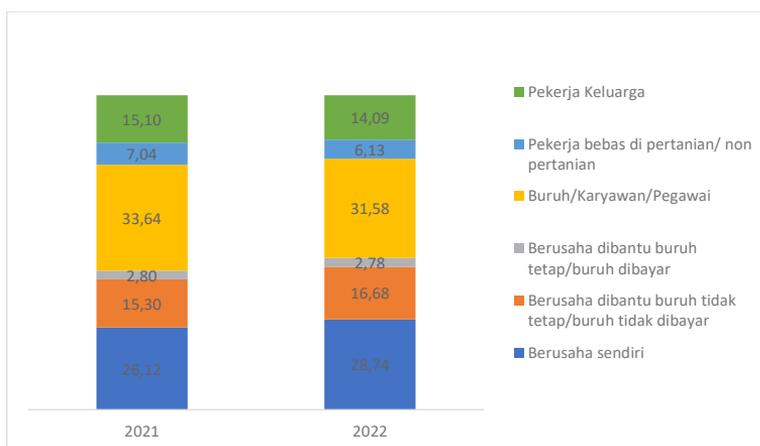
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2022, jumlah penduduk bekerja di Maluku Utara pada tahun 2020 sebesar 552,50 ribu penduduk. Kemudian meningkat menjadi 568,70 ribu penduduk pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencapai 584,97 ribu penduduk pada tahun 2022.



GAMBAR 2.5
Jumlah Penduduk yang Bekerja di Maluku Utara, 2020-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022

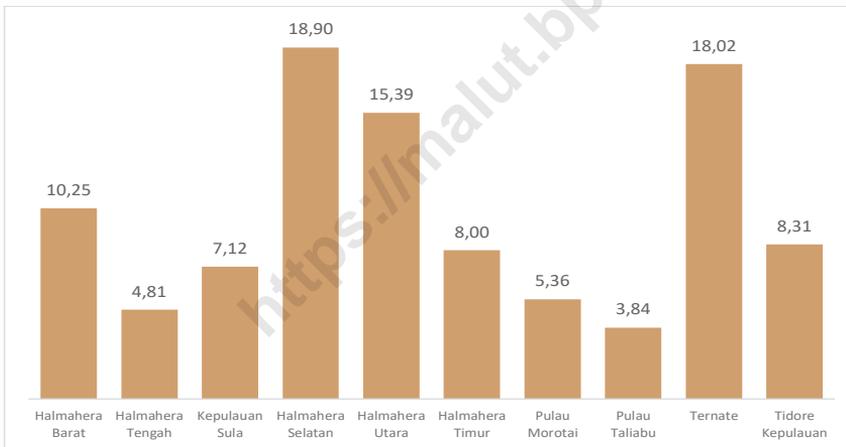
Apabila dilihat dari status pekerjaan utamanya, persentase penduduk yang status pekerjaan utamanya sebagai buruh/karyawan/pegawai menurun di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, yaitu dari 33,64 persen menjadi 31,58 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang berusaha sendiri meningkat dari 26,12 persen di tahun 2021 menjadi 28,74 persen di tahun 2022. Fenomena ini mengindikasikan adanya peralihan jenis pekerjaan dari pekerja menjadi pengusaha.



GAMBAR 2.6
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2021-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021-2022

Persentase penduduk yang bekerja berdasarkan kabupaten/kota di Maluku Utara tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat empat kabupaten/kota dengan persentase penduduk bekerja di atas 10 persen. Kabupaten Halmahera Selatan mencatatkan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 18,90 persen dan merupakan yang tertinggi di Maluku Utara. Disusul dengan Kota Ternate sebesar 18,02 persen, Kabupaten Halmahera Utara sebesar 15,39 persen dan Kabupaten Halmahera Barat sebesar 10,25 persen. Kabupaten/kota lainnya berurutan dari jumlah penduduk bekerja terbanyak adalah Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah. Sementara itu, persentase penduduk yang bekerja di Kabupaten Pulau Taliabu hanya sebesar 3,84 persen dan merupakan yang terendah di Maluku Utara tahun 2022.



GAMBAR 2.7
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022

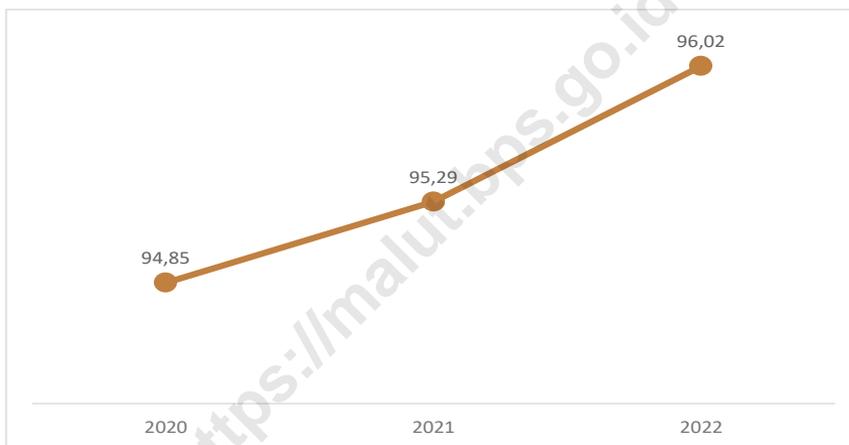
Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022

2.4 Tingkat Kesempatan Kerja

Pasokan tenaga kerja yang tinggi selayaknya disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula. Untuk mengukur sejauh mana penduduk usia kerja memperoleh kesempatan bekerja dari seluruh angkatan kerja yang tersedia, digunakan indikator Tingkat kesempatan kerja (TKK). Indikator TKK menunjukkan kemudahan angkatan kerja untuk berpartisipasi secara ekonomi di seluruh sektor.

Hal ini akan merefleksikan kemudahan masyarakat mencari kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya sekaligus berpartisipasi untuk mendapatkan imbalan berupa balas jasa atas faktor produksi dalam kegiatan ekonomi.

Perkembangan TKK Maluku Utara selama periode tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan pola yang terus meningkat (Gambar 2.8). Pada tahun 2020, saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, TKK Maluku Utara mencapai 94,85 persen. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai 96,02 persen pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kesempatan kerja untuk penduduk usia kerja di Provinsi Maluku Utara semakin tinggi pasca pandemi Covid-19.



GAMBAR 2.8
Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Provinsi Maluku Utara, 2020-2022 (Persen)

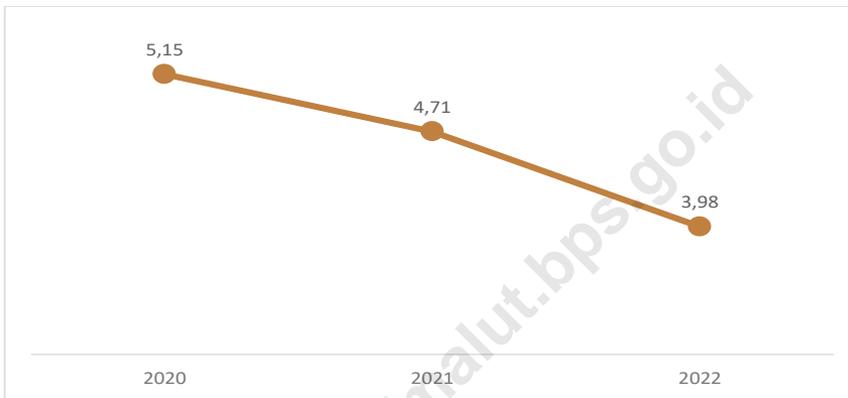
Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara

2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Semakin tinggi nilai TPT, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan.

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga

mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara pengangguran terbuka dengan angkatan kerja dalam persen. Semakin tinggi TPT menunjukkan bahwa semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja.



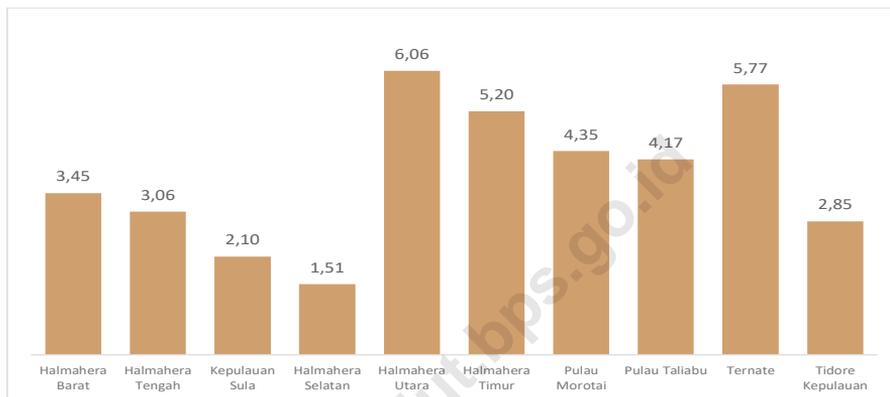
GAMBAR 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka di Maluku Utara, 2020– 2022(Persen)

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022

Tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara terus mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022, yaitu dari 5,15 persen pada tahun 2020 menjadi 4,71 persen pada tahun 2021 dan 3,98 persen pada tahun 2022. Penurunan TPT menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dimana penduduk usia kerja yang terserap dalam lapangan pekerjaan semakin banyak, baik sebagai pekerja maupun yang melakukan usaha

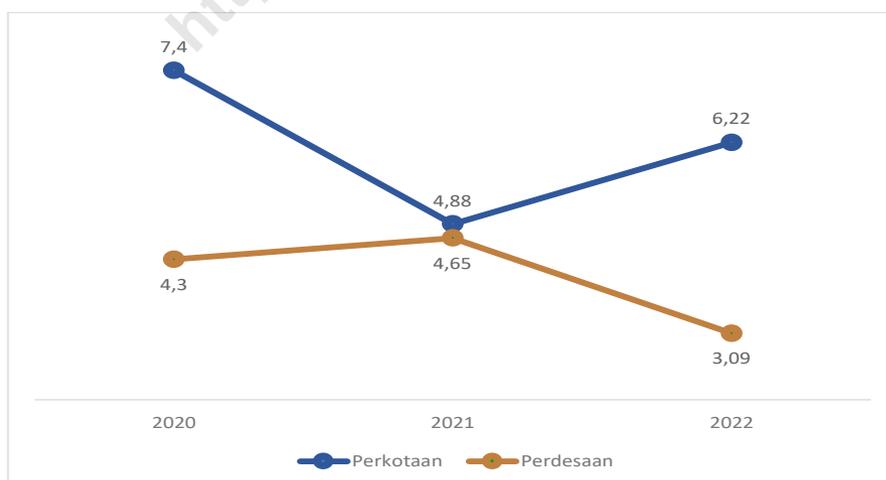
Persebaran tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tidak merata merupakan salah satu kendala dalam hal ketenagakerjaan. Kesempatan kerja yang lebih banyak terdapat di daerah perkotaan dan pusat-pusat industri menjadi faktor penarik terjadinya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan, meskipun tidak ada kepastian bahwa mereka akan mendapatkan perkerjaan di daerah perkotaan.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota di Maluku Utara tahun 2022, TPT tertinggi tercatat di Kabupaten Halmahera Utara dan satu-satunya dengan nilai di atas 6 persen, yaitu sebesar 6,06 persen. Sementara wilayah dengan TPT terendah terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan dengan persentase sebesar 1,51 persen. Rentang TPT yang besar antar wilayah kabupaten/kota mengindikasikan ketidakmerataan kesempatan kerja dalam pasar tenaga kerja di Maluku Utara.



GAMBAR 2.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022

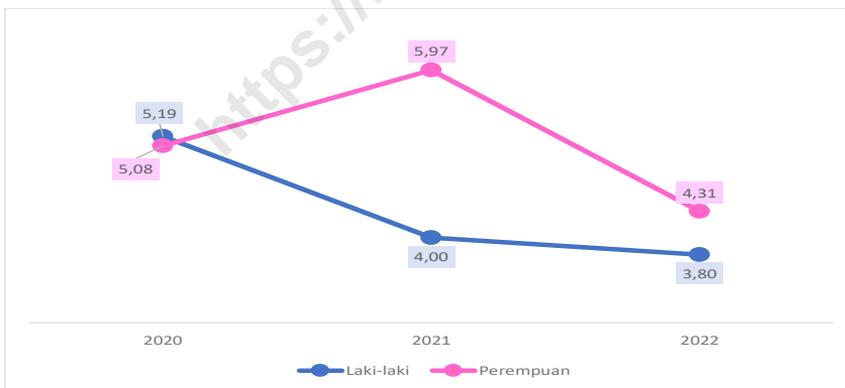


GAMBAR 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tipe Wilayah di Maluku Utara, 2020 – 2022

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022

Perkembangan TPT menurut wilayah di Provinsi Maluku Utara selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2022) menunjukkan pola yang berfluktuasi. Secara umum, level TPT di wilayah perkotaan terlihat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPT perdesaan. Pada bulan Agustus 2022 TPT perdesaan sebesar 3,09 persen lebih kecil dibandingkan TPT perkotaan yang mencapai 6,22 persen.

TPT berdasarkan jenis kelamin menunjukkan perbedaan di tahun 2020 dan tahun 2021-2022, dimana pada tahun 2020 TPT laki-laki yang sebesar 5,19 persen lebih tinggi dibandingkan perempuan yang sebesar 5,08 persen. Sementara di tahun 2020 dan 2021, TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. TPT perempuan mencapai 5,97 persen (2021) dan 4,00 persen (2022), sementara TPT laki-laki mencapai 4,00 persen (2021) dan 3,80 persen (2022). Perkembangan TPT laki-laki selama periode 2020 hingga 2022 menunjukkan pola yang menurun baik pada tahun 2021 maupun tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 telah mampu menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja laki-laki di Maluku Utara.



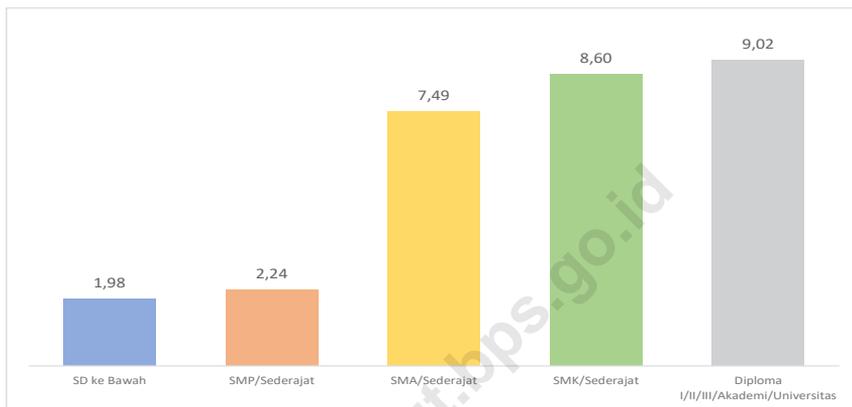
GAMBAR 2.12

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara, 2020 – 2022

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di tahun 2022, TPT tertinggi terjadi pada tamatan Diploma I/II/III/Akademi/Universitas sebesar 9,02 persen, disusul dengan tamatan SMK/ sederajat sebesar 8,6 persen dan tamatan SMA/ sederajat sebesar 7,49 persen. TPT pada lulusan SMP/ Sederajat tercatat

sebanyak 2,24 persen dan lulusan SD ke bawah (termasuk tidak lulus SD maupun tidak pernah bersekolah) merupakan yang terendah sebanyak 1,98 persen. Penduduk yang pendidikan tertingginya SD ke bawah cenderung akan melakukan berbagai pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan tanpa memerlukan kemampuan khusus meskipun digaji lebih rendah.



GAMBAR 2.13

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Maluku Utara, 2022

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022

Pada lulusan diploma/akademi/universitas yang memiliki kualitas tinggi dan keahlian/spesifikasi tertentu mencatatkan TPT tertinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Artinya, kebutuhan pasar tenaga kerja yang membutuhkan kemampuan dan keahlian tertentu belum dapat menyerap tenaga kerja dengan pendidikan tinggi. Sementara lulusan SMK dan SMA sederajat mencatatkan TPT lebih dari 7 persen, bahkan lulusan SMK/ sederajat yang menganggur menempati urutan kedua tertinggi mencapai 8,60 persen. Padahal, kurikulum pembelajaran di SMK sudah dipersiapkan untuk lulusannya dapat siap masuk dalam pasar tenaga kerja.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya, ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang perlu diperhatikan. Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, persebaran tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tidak merata antar daerah, serta kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan juga menjadi tanggung jawab bersama untuk diselesaikan. Berbagai upaya telah dilakukan dan harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan

untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Maluku Utara. Perencanaan tenaga kerja yang baik dari sisi pendidikan, lapangan pekerjaan, dan pengupahan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar dapat menciptakan perekonomian yang lebih tinggi dan stabil.

<https://malut.bps.go.id>

Capaian Indikator Makro di Maluku Utara

3

Indikator ekonomi dapat memberikan gambaran perkembangan dan daya dukung ekonomi dalam berbagai sektor dan komoditi sehingga peluang ekonomi untuk masa yang akan datang dapat diprediksi dan diperkirakan (Bappeda, 2017). Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia pada tahun 2020 menyebabkan kondisi ekonomi dan sosial mengalami gejala, termasuk di Maluku Utara. Dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19, telah dilakukan berbagai kebijakan termasuk pembatasan kegiatan masyarakat.

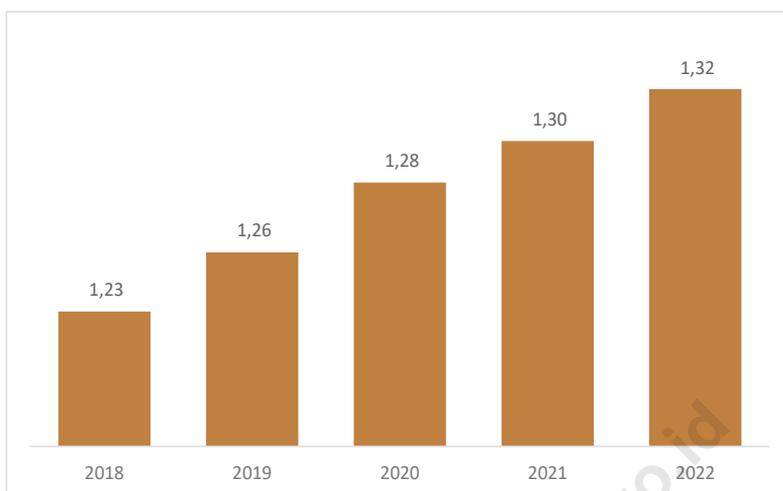
Pada tahun 2021 kondisi perekonomian Indonesia termasuk Maluku Utara menunjukkan perbaikan berkat adanya berbagai macam program pemulihan ekonomi baik yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kualitas sumber daya manusia, perekonomian hingga ketenagakerjaan dan lainnya. Pembahasan mengenai perkembangan indikator yang berkaitan dengan ketenagakerjaan menjadi hal yang menarik untuk dibahas seperti jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan pertumbuhan ekonomi.



Data penduduk sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan.

3.1 Jumlah Penduduk

Data penduduk sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan. Tersedianya data penduduk yang lengkap dan rinci akan sangat membantu dalam menentukan program kerja yang efektif. Kependudukan merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Jumlah penduduk di Maluku Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Gambar 3.1). Pada tahun 2018 jumlah penduduk Maluku Utara sebesar 1,23 juta jiwa meningkat sebesar 1,88 persen menjadi 1,26 juta jiwa pada tahun 2019. Jumlah penduduk Maluku Utara terus bertambah dimana pada tahun 2022 jumlah penduduk Maluku Utara tercatat sebesar 1,32 juta jiwa atau bertambah sebanyak 63,57 ribu jiwa dari jumlah penduduk pada tahun 2019



GAMBAR 3.1
Jumlah Penduduk Maluku Utara, 2018-2022 (jiwa)

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara

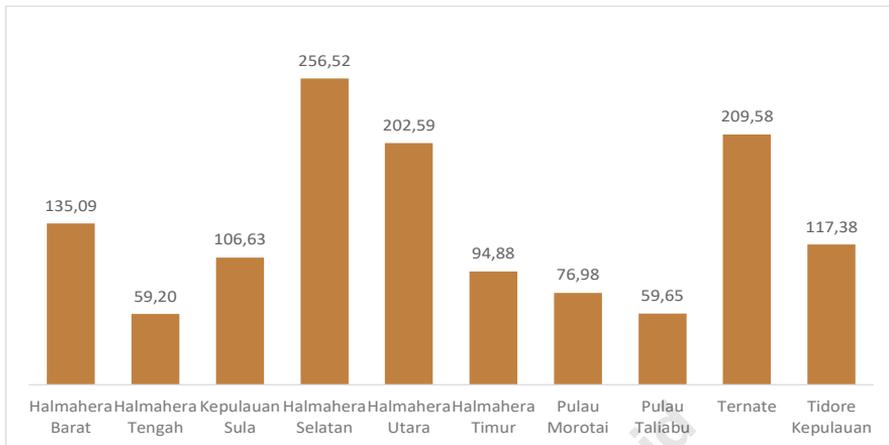
Maluku Utara merupakan daerah kepulauan dengan persebaran penduduk antar Kabupaten/Kota yang tidak merata. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata dapat menjadi beban pembangunan sosial ekonomi di suatu wilayah apabila tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.



Jumlah penduduk di kabupaten/kota di Maluku Utara pada tahun 2022 bervariasi yang terbanyak ada di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 256,52 ribu jiwa

Jumlah penduduk di kabupaten/kota di Maluku Utara pada tahun 2022 bervariasi dari yang terendah di Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 59,20 ribu jiwa hingga yang terbanyak ada di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 256,52 ribu jiwa.

Jumlah penduduk di Kota Ternate menempati posisi kedua terbanyak, yaitu sebesar 209,58 ribu jiwa. Kemudian disusul oleh Kabupaten Halmahera Utara (202,59 ribu jiwa), Kabupaten Halmahera Barat (135,09 ribu jiwa), Kota Tidore Kepulauan (117,38 ribu jiwa) dan Kabupaten Kepulauan Sula (106,63 ribu jiwa).



GAMBAR 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022 (ribu jiwa)

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara

3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang menunjukkan pembangunan kualitas hidup manusia. Pengukuran IPM terdiri dari tiga dimensi,

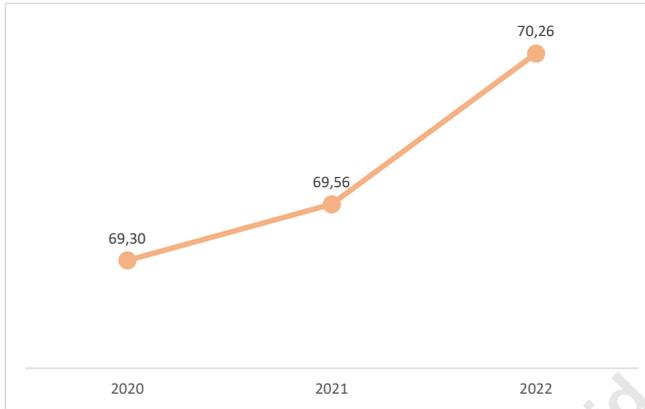
yaitu dimensi kesehatan yang diukur dari umur Panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan yang diukur dari harapan dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi standar hidup layak yang dilihat dari pengeluaran perkapita pertahun untuk barang konsumsi atau kebutuhan rumah tangga.



Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang menunjukkan pembangunan kualitas hidup manusia

Perubahan nilai IPM yang meningkat dari waktu ke waktu menunjukkan kualitas hidup manusia yang meningkat pula. Pada tahun 2022, IPM di Maluku Utara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menjadi 70,26. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah dalam hal pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara. Status pembangunan manusia pada nilai IPM berkisar antara 70 hingga 80 sehingga dikategorikan tinggi, yang

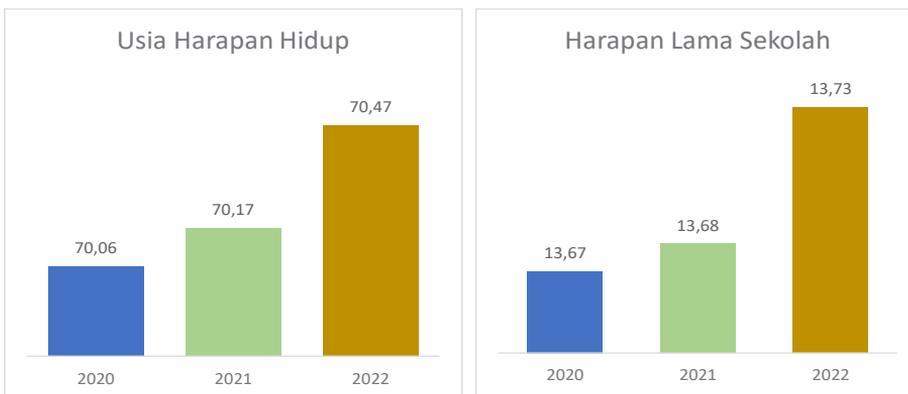
berarti kualitas hidup manusia di Maluku Utara tahun 2022 tergolong tinggi.

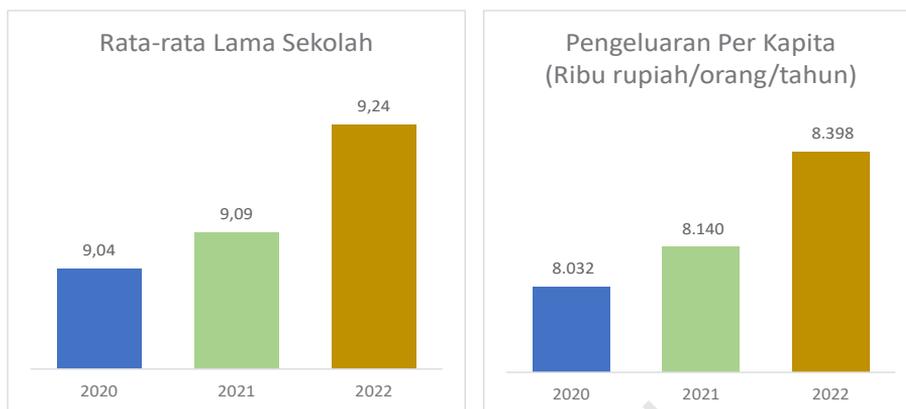


GAMBAR 3.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku Utara, 2020-2022

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara

Tiga komponen IPM digambarkan oleh 4 variabel dalam penghitungan, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) untuk dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk dimensi pendidikan, serta Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan untuk dimensi standar hidup layak. Di Maluku Utara, selama periode tahun 2020 hingga 2022 semua dimensi baik dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan taraf kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak penduduk di Maluku Utara semakin membaik.





GAMBAR 3.4
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku Utara, 2020-2022

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara

Capaian komponen IPM pada dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak menunjukkan nilai yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2021. Pada dimensi kesehatan, Usia Harapan Hidup penduduk di Maluku Utara tahun 2022 sebesar 70,47 menunjukkan bahwa rata-rata penduduk yang lahir tahun 2022 dapat hidup hingga mencapai umur 70 atau 71 tahun. Pada dimensi Pendidikan, arti angka Harapan Lama Sekolah adalah rata-rata penduduk Maluku Utara yang berusia 7 tahun yang masuk pada jenjang Pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah 13,73 tahun atau setara dengan Diploma II. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Maluku Utara di tahun 2022 sebesar 9,24 bermakna bahwa rata-rata penduduk Maluku Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh Pendidikan selama 9,24 tahun atau setara kelas IX SMP. Pada dimensi standar hidup layak, Pengeluaran Per Kapita penduduk di Maluku Utara tahun 2022 sebesar 8.398 ribu rupiah

3.3 Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 mulai membaik di tahun 2021. Meskipun belum mencapai kondisi ekonomi sebelum pandemi, berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan mulai berjalan kembali. Kondisi perekonomian di Maluku Utara dalam lima tahun

terakhir cukup stabil pada tahun 2018 hingga 2019 dengan nilai pertumbuhan di atas enam persen. Pada saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, perekonomian perekonomian Maluku Utara tetap tumbuh sebesar 5,39 persen. Meskipun sempat mengalami perlambatan sebesar 0,86 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melesat tajam mencapai 16,79 persen. Hal ini membuat Maluku Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara kembali mencatatkan pertumbuhan yang tertinggi dengan persentase sebesar 22,94 persen. Menurut Laporan Perekonomian Bank Indonesia pada bulan Februari 2023, tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2022 ditopang oleh masifnya pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan sejalan dengan terus bertambahnya jumlah *smelter* yang diikuti dengan optimalisasi produksi, serta pengaruh dari tren positif harga nikel dunia sepanjang tahun 2022.

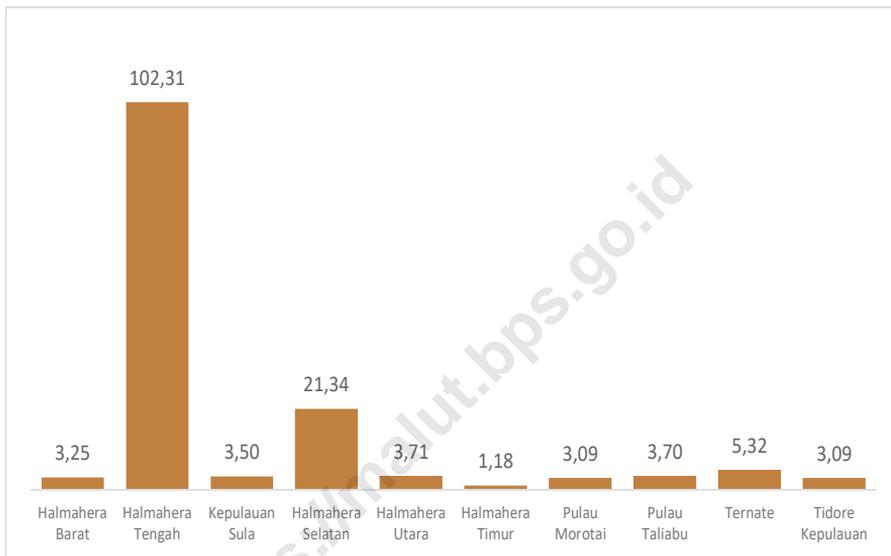


GAMBAR 3.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara, 2018-2022 (Persen)

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara

Kondisi perekonomian di kabupaten/kota se-Maluku Utara juga cenderung menunjukkan pola yang sama. Hampir semua kabupaten/kota tidak mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif pada tahun 2020 akibat pembatasan kegiatan berskala besar yang dilakukan pada masa pandemi. Hanya 2 kabupaten/kota yang mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2020, yaitu Kabupaten Halmahera Utara dan Kota Ternate. Kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi

di Maluku Utara tahun 2022 adalah Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu sebesar 102,31 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Halmahera Tengah didorong oleh pesatnya perkembangan di sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Pertumbuhan terendah tercatat di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu sebesar 1,18 persen.



GAMBAR 3.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022 (Persen)

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara

**Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Pengangguran di
Maluku Utara**

4

Perkembangan indikator-indikator perekonomian dapat menggambarkan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun, pengangguran merupakan problematika yang kompleks karena dipengaruhi dan akan mempengaruhi indikator ekonomi lainnya seperti tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengangguran akan berdampak pada permasalahan baik sosial maupun



Tingkat pengangguran dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

ekonomi. Penyebab utama pengangguran adalah tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup luas untuk menampung seluruh angkata kerja yang ada.

Sampai saat ini masalah pengangguran masih menjadi perhatian utama diberbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena pengangguran di suatu wilayah dapat diukur dengan menggunakan indikator ketenagakerjaan, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menunjukkan persediaan (*supply*) tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Semakin tinggi nilai indikator ini, artinya, semakin banyak pula persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan pasokan tenaga kerja.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), perkembangan indikator TPT di Indonesia selama kurun waktu 2017-2022 menunjukkan pola yang berfluktuasi dengan kecenderungan menurun meskipun sempat mengalami peningkatan tajam pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Besarnya TPT bervariasi antara lima sampai tujuh persen tergantung dari kondisi perekonomian sepanjang waktu. Secara umum, pola TPT di Provinsi Maluku Utara selama periode Agustus 2017-2021 berada di bawah rata-rata angka Nasional. Hal ini merupakan sinyal positif bagi pembangunan ekonomi Maluku Utara.

Kajian ini akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara. Data yang digunakan adalah

data panel 10 kabupaten/kota di Maluku Utara selama tahun 2017-2022 hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), PDRB, IPM, Jumlah Penduduk dari BPS Provinsi Maluku Utara.



GAMBAR 4.1
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2010-2021 (Persen)

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara

4.1 Metode Analisis

Analisis inferensia yang digunakan adalah regresi panel dengan bantuan aplikasi *e-views* untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara. Data panel adalah gabungan data time series dan cross section. Analisis data panel juga lebih baik digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh yang secara sederhana tidak dapat dideteksi dalam data cross section maupun time series murni (Baltagi, 2011).

Regresi menggunakan data panel disebut model regresi panel. Regresi panel merupakan pengembangan dari regresi linier dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang memiliki kekhususan jenis data dan tujuan analisisnya (Rahmaniar, 2019). Analisis regresi panel dapat melihat efek individu. Secara umum, model regresi panel adalah sebagai berikut (Baltagi, 2011):

$$y_{it} = \alpha + X'_{it}\beta + \mu_{it}$$

dimana:

$i = \text{cross section, dimana } i = 1, 2, \dots, N;$

$t = \text{periode waktu, dimana } t = 1, 2, \dots, T;$

$\alpha = \text{scalar};$

$\beta = K \times 1;$

$X_{it} = \text{it observasi pada } K \text{ variable penjelas}$

Dalam model regresi panel, terdapat beberapa model pendekatan yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Selanjutnya, dari ketiga model tersebut dipilih model terbaik yang dapat digunakan. Pemilihan model terbaik dapat dilakukan dengan *Chow Test*, *Haussman Test*, dan *Lagrange Multiplier (LM) Test*.

Setelah terpilih model terbaik, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian asumsi klasik Normalitas dan Multikolinearitas. Pengujian normalitas menggunakan Uji *Jarque-Bera (JB)*, yaitu berdasarkan koefisien keruncingan (*kurtosis*) dan koefisien kemiringan (*skewness*). Sedangkan multikolinearitas menggunakan matrik korelasi. Multikolinearitas terjadi saat korelasi antar variabel independen >0.7 .

4.2 Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dibahas hasil penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan jumlah penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan model terbaik yang akan digunakan. Adapun hasil pengujian pemilihan model terbaik adalah sebagai berikut:

1. Chow Test

Chow test dilakukan untuk memilih model terbaik antara *model common effect* dan *fixed effect*. Hipotesis yang digunakan pada *chow test* adalah:

$$H_0 = \mu_i = 0 (\text{Common Effect Model})$$

$$H_a = \mu_i \neq 0 (\text{Fixed Effect Model})$$

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6,117545	(9,47)	0,0000
Cross-section Chi-square	46,523563	9	0,0000

Hasil pengujian diperoleh probabilitas *cross-section* F sebesar 0,0000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tolak H_0 , artinya model terbaik yang tepat digunakan adalah *fixed effect model*. Selanjutnya, perlu dilakukan *hausman test* untuk menguji model terbaik antara *fixed effect model* dan *random effect model*.

2. Hausman Test

Hipotesis yang digunakan pada hausman test adalah sebagai berikut:

$$H_0 : E(\mu_{it} | x_{it}) = 0 \text{ (Random Effect Model)}$$

$$\mu_{it} = \mu_i + v_{it}$$

$$H_a : E(\mu_{it} | x_{it}) \neq 0 \text{ (Fixed Effect Model)}$$

$$\mu_{it} = \mu_i + v_{it}$$

Correlated Random Effects – Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section F	11,669967	3	0,0086

Hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0145, lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tolak H_0 , artinya model terbaik yang tepat digunakan adalah *fixed effect model*. Dari kedua uji pemilihan model terbaik yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan adalah *fixed effect model*. Berdasarkan model terbaik menggunakan *fixed effect model*, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Dependent Variable: Y_TPT

Method: Panel Least Squares

Date: 11/20/23 Time: 16:21

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4,210612	1,173647	3,587631	0,0008
X1_IPM	-0,572671	0,178069	-3,215998	0,0024
X2_LPE	-0,000184	0,007107	-0,025925	0,9794
X3_LajuPertPddk	0,382399	0,332309	1,150733	0,2557

Effect Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0,56940	Mean dependent var	4,76683
Adjusted R-squared	0,45946	S.D. dependent var	1,39883
S.E. of regression	1,02844	Akaike info criterion	3,08311
Sum squared resid	4,97118	Schwarz criterion	3,53688
Log likelihood	-7,94932	Hannan-Quinn criter.	3,26060
F-statistic	5,17911	Durbin-Watson stat	1,33981
Prob(F-statistic)	0,000019		

Adapun hasil *cross section effect* untuk masing-masing kabupaten/kota di Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tabel cross section effect masing-masing Kabupaten/Kota di Maluku Utara berdasarkan model fixed effect model

No	Kabupaten/Kota	Cross Id	Effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Halmahera Barat	1	-2,406044
2	Halmahera Tengah	2	-1,252490
3	Kepulauan Sula	3	-2,134680
4	Halmahera Selatan	4	-2,676603
5	Halmahera Utara	5	1,975378
6	Halmahera Timur	6	0,165601
7	Pulau Morotai	7	-2,123706
8	Pulau Taliabu	8	-2,742109
9	Ternate	9	9,158040
10	Tidore Kepulauan	10	2,036614

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari hasil tersebut, maka didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$\hat{y}_{it} = 4,210612 - 0,572671IPM_t * -0,000184LPE_t * +0,382399LJPend_t \\ * -2,406044D_1 - 1,252490D_2 - 2,134680D_3 - 2,676603D_4 \\ + 1,975378D_5 + 0,165601D_6 - 2,123706D_7 - 2,742109D_8 \\ + 9,158040D_9 + 2,036614D_{10}$$

Hasil kajian menggunakan *fixed effect model* dengan 3 (tiga) variabel yang diduga memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dapat diketahui bahwa pada tingkat signifikansi 5%, hanya variabel IPM yang berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sementara pertumbuhan PDRB dan Laju Pertumbuhan Penduduk tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5% tidak mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara.

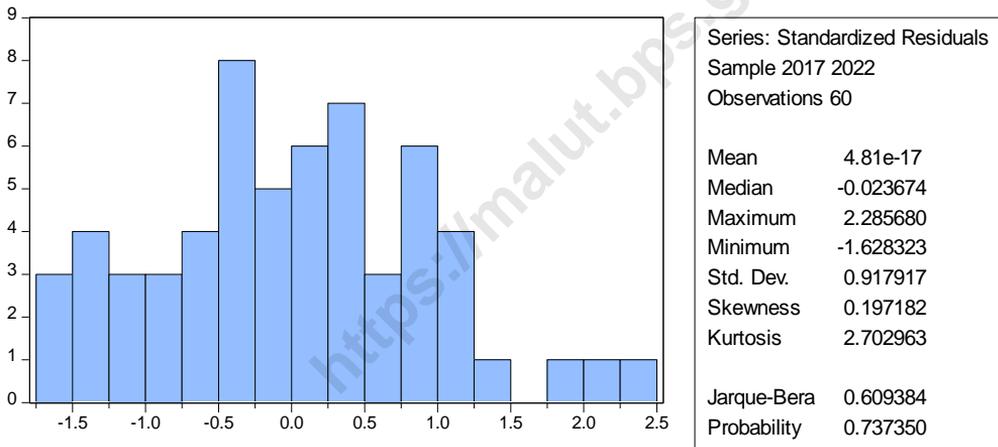
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara. Saat IPM meningkat 1 satuan, maka TPT akan turun sebesar 0,57% dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia melalui investasi pendidikan akan meningkatkan keterampilan seseorang, sehingga akan memperbesar peluang kesempatan kerja. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk tidak signifikan mempengaruhi TPT di Maluku Utara. Hal ini karena Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah baik perikanan, pertanian maupun pertambangan. Kebanyakan penduduk bekerja sebagai nelayan atau petani yang masih menggunakan sumber daya alam sebagai lapangan pekerjaan.

Kemudian laju pertumbuhan PDRB juga tidak signifikan mempengaruhi TPT di Maluku Utara. Hal ini dikarenakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara adalah melesatnya kinerja sektor pertambangan penggalian serta industri pengolahan. Tingginya pertumbuhan PDRB masih terkonsentrasi di sektor pertambangan dan industri pengolahan. Berkat pertambangan dan hilirisasi nikel, Maluku Utara menjadi salah satu provinsi yang meraih pertumbuhan ekonomi dua digit pada tahun 2021 hingga 2022.

Akan tetapi, tingginya pertumbuhan PDRB Maluku Utara belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan sektor pertambangan dan industri pengolahan yang pesat tidak diiringi dengan pertumbuhan sektor pertanian dan sektor lainnya, sehingga menciptakan ketimpangan antar kabupaten/kota semakin tajam. Penyetaraan di sektor nontambang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh Masyarakat luas (Kristian B.P, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jember, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik belum bisa menjelaskan pengurangan jumlah

pengangguran yang ada di Kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga tingkat pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi (Firdhania & Muslihatiningsih, 2017).

Berdasarkan hasil analisis *cross section effect*, dapat diketahui bahwa TPT di Kota Ternate paling tinggi daripada kabupaten/kota lain sebesar 9,16 persen dengan asumsi variabel independen sama. TPT di Kabupaten Halmahera Timur paling rendah daripada kabupaten/kota lain sebesar 0,16 persen dengan asumsi variabel independen sama. Tahapan selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik normalitas dan multikolinearitas. Uji normalitas menggunakan statistik uji *Jarque Bera* didapatkan hasil sebagai berikut:



GAMBAR 4.2
Histogram residual berdasarkan model terpilih *fixed effect model*

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara (diolah)

Berdasarkan histogram, dapat diketahui bahwa residual berdistribusi normal. Selain itu, hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,7374, lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Kesimpulan yang didapatkan adalah gagal tolak H_0 , artinya residual berdistribusi normal. Uji asumsi klasik selanjutnya adalah multikolinearitas. Berdasarkan uji multikolinearitas yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tabel matriks korelasi Variabel IPM, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan PDRB Maluku Utara

	IPM	LPE	LAJUPERTMPDDK
IPM	1,00000	-0,05526	-0,24427
LPE	-0,05526	1,00000	0,22057
LAJUPERTMPDDK	-0,24427	0,22057	1,00000

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan matrik korelasi yang dihasilkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan penduduk, dan laju pertumbuhan PDRB berkorelasi rendah (dibawah 0,7). Hal ini sesuai dengan asumsi regresi, dimana tidak ada korelasi erat antar variabel independen meskipun secara teori terdapat korelasi antar variabel tersebut.

Perkembangan Indikator Kesejahteraan Rakyat

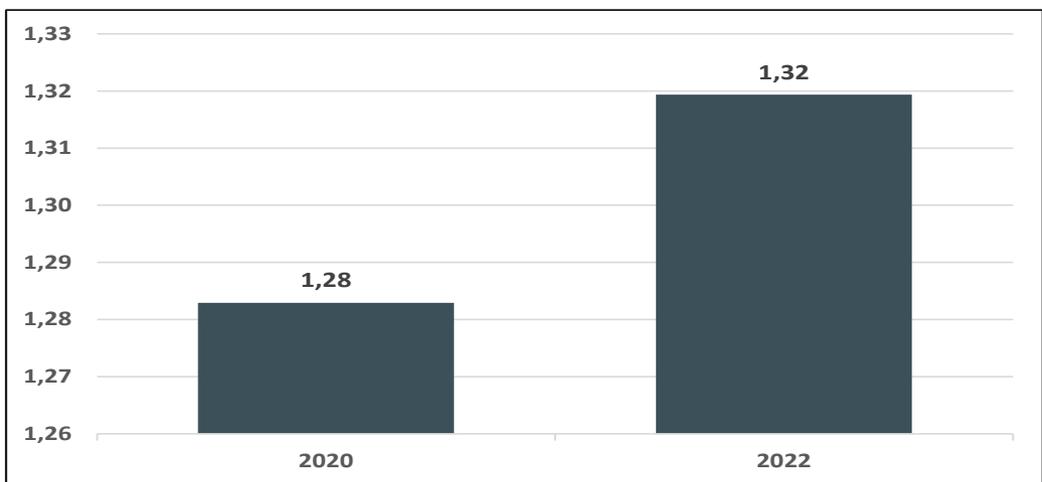
5

5.1 Kependudukan

Penduduk sebagai pelaku maupun sebagai objek pembangunan otomatis menjadi modal dasar yang diperlukan demi berhasilnya kegiatan pembangunan suatu wilayah. Masalah kependudukan masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi beban dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk yang berkembang pesat tanpa diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan yang layak.

Data dan informasi kependudukan merupakan data strategis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk di Maluku Utara dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Maluku Utara pada tahun 2022 mencapai 1,32 juta orang atau mengalami peningkatan sebesar 1,61 persen bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020 yang mencapai 1,28 juta jiwa. BPS mencatat rasio jenis kelamin penduduk Maluku Utara tahun 2022 sebesar 105. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Maluku Utara lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau terdapat 105 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

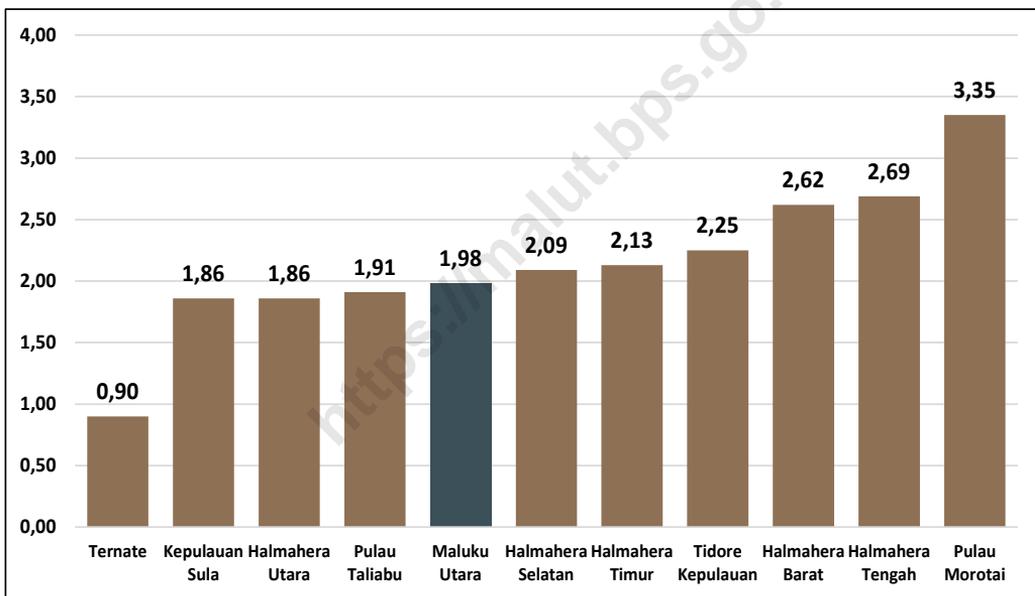
Gambar 5.1 Jumlah Penduduk Maluku Utara Tahun 2021 dan 2022 (Juta Jiwa)



Sumber: Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2022, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Laju pertumbuhan penduduk Maluku Utara per tahun 2010-2022 adalah sebesar 1,98 persen. Dari sepuluh kabupaten/kota yang ada di Maluku Utara terdapat enam kabupaten/kota yang berada di atas laju pertumbuhan penduduk Maluku Utara. Sedangkan empat kabupaten/kota lain memiliki laju pertumbuhan penduduk di bawah laju pertumbuhan penduduk Maluku Utara. Kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di tahun 2022 adalah Kabupaten Pulau Morotai, yaitu 3,35 persen. Adapun pertumbuhan penduduk terendah dicapai oleh Kota Ternate sebesar 0,90 persen.

Gambar 5.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2020-2022



Sumber: Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Persoalan yang terkait dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang belum merata. Pada tahun 2022 kepadatan penduduk Maluku Utara tercatat 41 orang/km². Kabupaten/Kota dengan kepadatan penduduk terbesar adalah Kota Ternate, yaitu sebanyak 1856 orang/km². Penduduk Maluku Utara sebagian besar terpusat di Kota Ternate, padahal persentase luas Kota Ternate hanya 0,35 persen terhadap luas provinsi Maluku Utara. Sementara itu, Kabupaten dengan kepadatan penduduk terendah di Maluku Utara adalah Kabupaten Halmahera Timur, yaitu sebesar 14 orang/km², hanya 0,77 persen

dari kepadatan Kota Ternate, padahal luas daerahnya merupakan kedua terbesar di Maluku Utara setelah Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu sebesar 20,55 persen dari total luas provinsi. Akses dan fasilitas dianggap menjadi salah satu penyebab utama terkonsentrasinya penduduk hanya pada wilayah perkotaan.

Tabel 5.1 Kepadatan Penduduk, Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, 2022

Wilayah	Kepadatan Penduduk per km ²	Luas Daerah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	80,71	1.704,20	5,33
Halmahera Tengah	22,27	2.653,76	8,30
Kepulauan Sula	32,31	3.304,32	10,33
Halmahera Selatan	31,39	8.148,90	25,48
Halmahera Utara	52,03	3.896,90	12,18
Halmahera Timur	14,38	6.571,37	20,55
Pulau Morotai	31,61	2.476,00	7,74
Pulau Taliabu	40,55	1.469,93	4,60
Ternate	1.856,05	111,39	0,35
Tidore Kepulauan	71,85	1.645,73	5,14
Maluku Utara	41,25	31.982,50	100,00

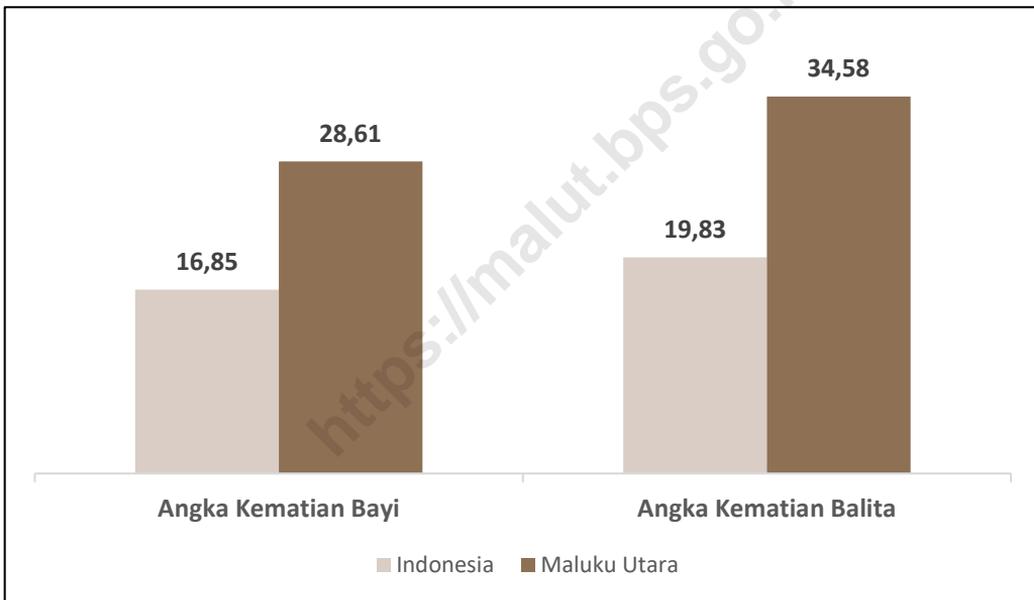
Sumber: Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

5.2 Kesehatan dan Gizi

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi

setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta bersama-sama. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sudah melakukan berbagai program-program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti dengan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti melalui BPJS, puskesmas-puskesmas, meningkatkan fasilitas tenaga kesehatan, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, meningkatkan tingkat imunitas dan gizi balita dan sebagainya.

Gambar 5.3 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2022



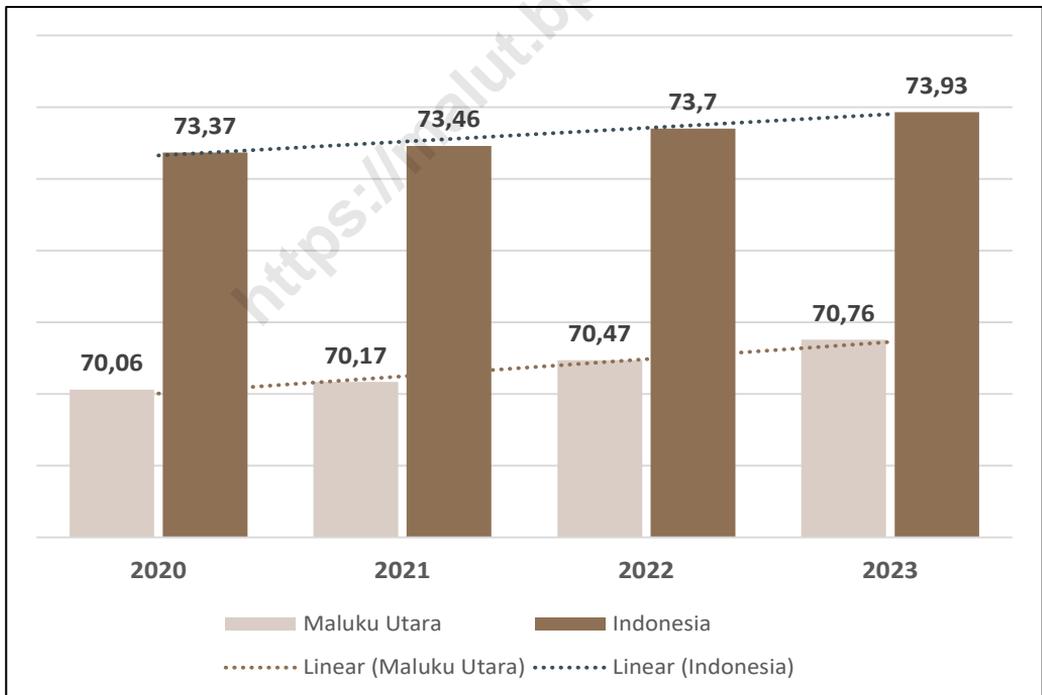
Sumber: Hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 Provinsi Maluku Utara, BPS Provinsi Maluku Utara

Berhasil tidaknya program-program pemerintah dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan berbagai indikator kesehatan seperti Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu, Angka Kesakitan, prevalensi Balita Kurang dan indikator-indikator yang lain yang berkaitan dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan. AKB dan AKABA di suatu negara atau wilayah merupakan salah satu rujukan melihat tingkat kesehatan di wilayah tersebut. Pada Tahun 2022 AKB di Maluku Utara dari Hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LFSP2020) adalah 29 kematian per 1000 kelahiran hidup, angka ini

di atas angka nasional yaitu 17 kematian per 1000 kelahiran hidup. Tidak hanya AKB, AKABA Maluku Utara juga berada di atas nasional yaitu sebanyak 36 kematian per 1000 kelahiran hidup, sementara AKABA Indonesia adalah sebanyak 20 kematian per 1000 kelahiran hidup.

Dimensi kesehatan juga bisa dilihat dari UHH saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. UHH saat lahir Maluku Utara pada tahun 2023 adalah sebesar 70,76 tahun, berada di bawah angka nasional yang sebesar 73,93 tahun. Namun demikian, Maluku Utara berhasil meningkatkan UHH saat lahir dari tahun 2020 hingga 2023 sebesar 0,7 tahun. Peningkatan terus terjadi selama kurun waktu tersebut baik UHH pada tingkat nasional maupun UHH Maluku Utara.

Gambar 5.4 Umur Harapan Hidup (UHH) Maluku Utara dan Indonesia 2018–2022

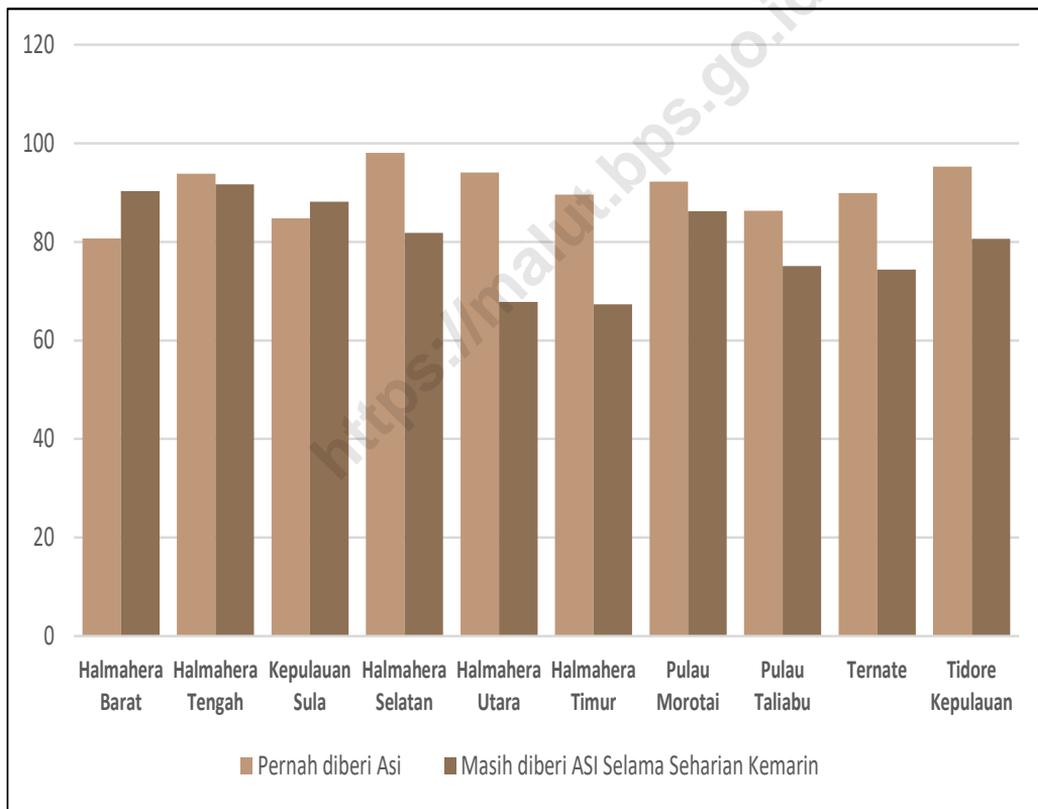


Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

Kondisi kesehatan masyarakat memiliki kecenderungan terkait dengan tingkat asupan gizi. Salah satu asupan gizi terbaik bagi bayi dan balita adalah ASI. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena ASI mengandung zat gizi dengan

komposisi sesuai dengan kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang bayi secara optimal, (WHO 2001; Prasetyono, 2009). Selain itu peningkatan program ASI eksklusif merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. ASI sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang sangat dibutuhkan bayi untuk jangka panjang dalam proses tumbuh kembang. ASI memiliki nutrisi terbaik dan zat-zat berkualitas tinggi yang bisa memberikan antibodi dan tingkat kecerdasan untuk bayi.

Gambar 5.5 Persentase Anak Usia 0-23 Bulan yang pernah dan masih diberi ASI selama sehariian kemarin menurut Kabupaten/Kota, 2022



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

BPS Provinsi Maluku Utara mencatat pada tahun 2022 anak usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI telah mencapai 91,77 persen. Presentase anak usia 0-23 bln yang pernah diberi ASI paling tinggi di kabupaten Halmahera Selatan yaitu 98,07 persen.

Pemberian ASI sampai dengan usia 24 bulan sangat penting bagi perkembangan anak. Di Provinsi Maluku Utara sebanyak 78,35 persen anak usia 0-23 bulan masih diberi ASI. Kabupaten dengan persentase tertinggi adalah Kabupaten Halmahera Tengah dengan persentase sebesar 91,72 persen anak usia 0-23 bulan yang masih diberi ASI, sementara kabupaten dengan persentase terendah adalah Kabupaten Halmahera Timur dengan persentase sebesar 67,36 persen.

Selain ASI hal yang sangat diperlukan untuk bagi kesehatan anak dan tingkat kekebalan tubuh anak adalah pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan pemberian sistem kekebalan tubuh anak agar kuat terhadap suatu penyakit, jenis imunisasi ada dua macam yaitu kekebalan tubuh yang sudah ada pada diri anak yang merupakan bawaan sejak lahir dan kekebalan yang diberikan kepada anak seperti pemberian vaksin bisa melalui suntik ataupun tetes. Di Indonesia imunisasi ada yang wajib dan juga ada yang dianjurkan, imunisasi wajib seperti BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B, sedangkan beberapa imunisasi yang dianjurkan seperti Typus, influenza, MMR dan masih banyak lagi.

Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara tahun 2022 sebesar 51,22 persen balita yang ada di Maluku Utara pernah mendapatkan imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pemberian imunisasi di Provinsi Maluku Utara masih perlu ditingkatkan lagi.

5.3 Pendidikan

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan

gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain Kemampuan membaca dan menulis, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

Kemampuan Membaca dan Menulis

Indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (*literacy rate*). AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin. Namun pada kenyataannya pada tahun 2022 masih ada sekitar 1,96 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Maluku Utara yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin (BPS Provinsi Maluku Utara, 2022).

Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah menjamin bahwa sampai dengan tahun 2030 semua anak, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar (*primary schooling*). Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2022 masih terdapat sekitar 0,87 persen penduduk usia 7-12 tahun di Maluku Utara yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Sementara pada kelompok usia 13-15 tahun sebesar 2,41 persen. Adapun penduduk yang belum mengenyam pendidikan dan terbanyak terdapat pada kelompok usia 16 – 18 tahun, yaitu sebesar 22,3 persen.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Namun, informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya. Misalnya, APS pada jenjang usia 7-12 tahun mengabaikan informasi anak berusia 12 tahun yang bersekolah pada kelas VII. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jejang pendidikan, indikator Angka Partisipasi Murni (APM) lebih relevan.

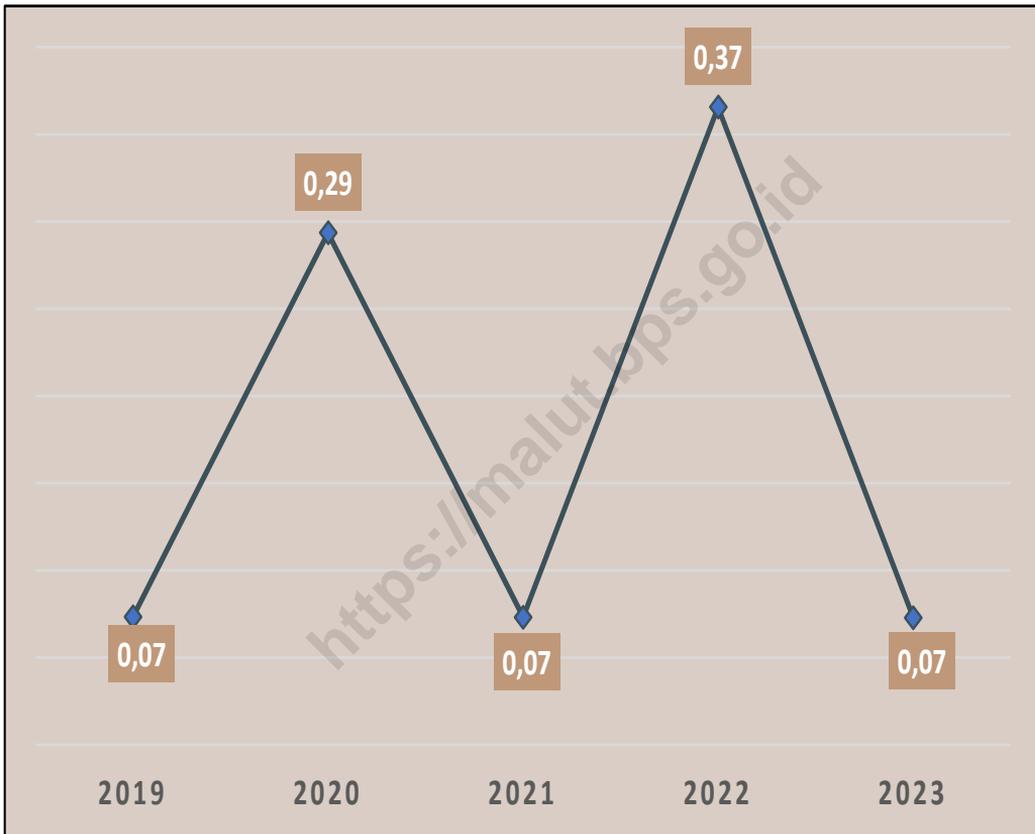
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Pada tahun 2022, capaian APM usia SD (7-12 tahun) di Maluku Utara telah mencapai 97,27 persen. Sementara itu, APM SMP telah mencapai 77,41 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa masih sekitar 22,59 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP. Dengan demikian, capaian APM SMP pada tahun 2022 masih menunjukkan bahwa pendidikan di tingkat SMP belum dirasakan oleh seluruh anak usia 13-15 tahun. Oleh karena itu, perlu program yang lebih komprehensif agar pendidikan dasar dirasakan oleh semua masyarakat. Lebih lanjut, angka terendah APM berada pada jenjang usia SMA yang berada pada 65,35 persen pada tahun 2022.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

HLS merupakan indikator pendidikan yang menunjukkan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia tertentu pada masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS Maluku Utara menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2023, HLS Maluku Utara mencapai 13,74 tahun, hal ini menandakan bahwa anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,74 tahun atau setara

dengan Diploma II. Harapan lama sekolah Maluku Utara selama tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya saja pertumbuhannya yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

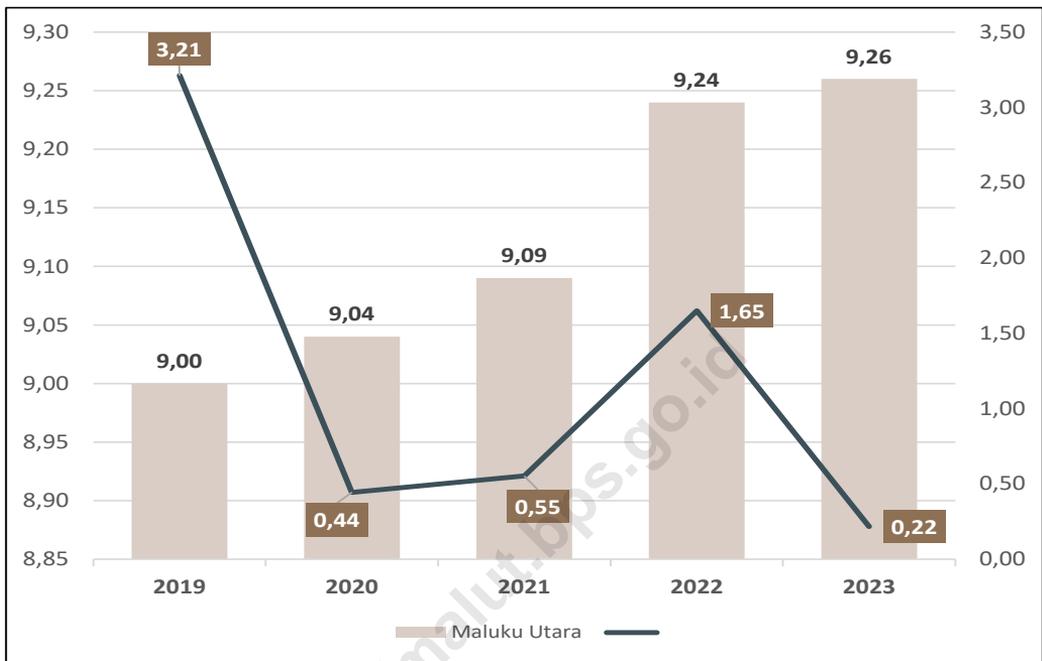
Gambar 5.6 Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Maluku Utara Tahun 2018-2023



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

Sejalan dengan pola yang ditunjukkan oleh HLS, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Maluku Utara juga terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2023 mencapai 9,26 tahun. Artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Maluku Utara menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 (SMP kelas IX). Angka ini menunjukkan bahwa pendidikan di Maluku Utara sudah mencapai target program wajib belajar 9 tahun. Apabila dilihat dari pertumbuhan angka RLS, pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 3,21 persen, sementara pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 0,22 persen.

Gambar 5.7 Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Maluku Utara Tahun 2018–2023



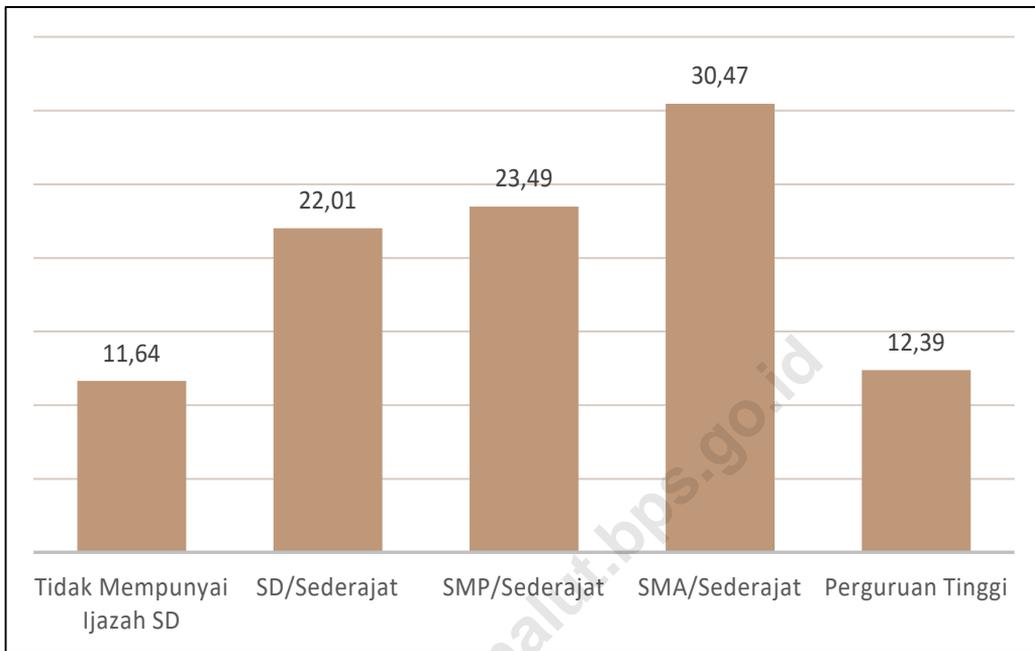
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dianggap menjadi suatu hal yang krusial bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dianggap memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Kualitas SDM dapat dilihat dari kemampuan, keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan melalui tingkat pendidikan.

Kepemilikan ijazah STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Maluku Utara tergolong masih rendah. Masih ada 11,64 persen penduduk yang tidak memiliki ijazah. Untuk ijazah tertinggi yang dimiliki pun seluruh jenjang berada di bawah 50 persen dengan persentase kepemilikan tertinggi adalah SMA/ sederajat sebesar 30,47 persen dan terendah pada perguruan tinggi sebesar 12,39 persen. Kondisi ini menggambarkan masih perlu upaya keras untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sehingga pendidikan dasar 9 tahun dapat tercapai.

Gambar 5.8 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah STTB Tertinggi yang Dimiliki di Maluku Utara, 2022



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

5.4 Ketenagakerjaan

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang tergolong padat, isu terkait ketenagakerjaan menjadi tidak asing lagi bagi Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia telah menghadapi bonus demografi. Laporan PBB (UNFPA, 2013), memprediksi angka ketergantungan penduduk Indonesia akan terus menurun, namun jumlah angkatan kerja (15 – 64 tahun) pada 2020 – 2030 mencapai 70 persen. Lebih lanjut, Lembaga Demografi FEB UI memproyeksi bahwa angkatan kerja Indonesia akan meningkat 148,5 juta pada 2025 dibandingkan dengan tahun 2005. Hal inilah yang akan menjadi tantangan ketenagakerjaan ke depannya mengingat angkatan kerja semakin banyak tetapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.

Sub bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2021, 2022 dan 2023 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

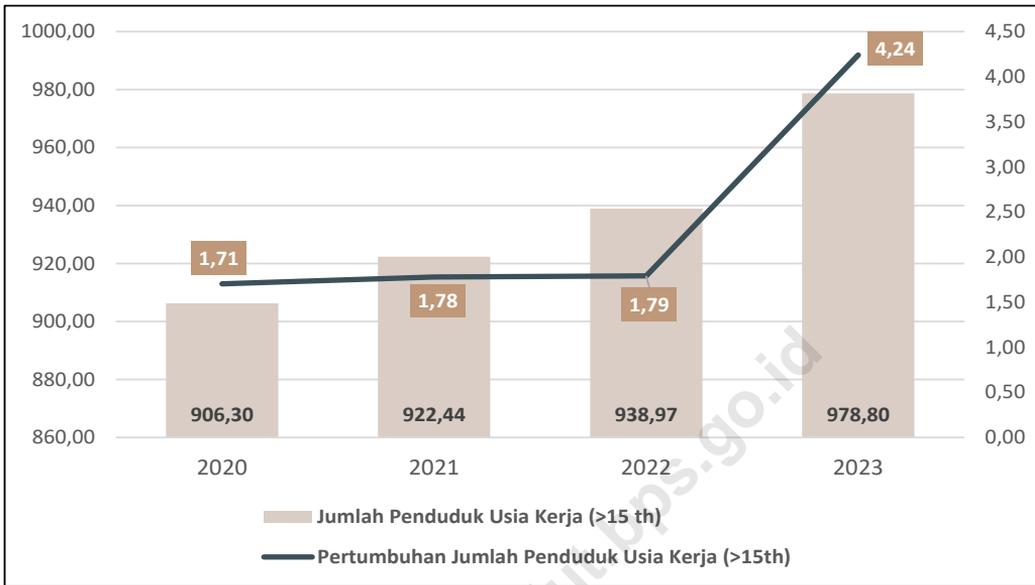
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Maluku Utara Agustus 2023 sebanyak 978,8 ribu orang bertambah sebanyak 72,5 ribu orang dibandingkan Agustus 2020. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah penduduk usia kerja sebesar 4,24 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Jumlah penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) terus tumbuh hingga tahun 2023.

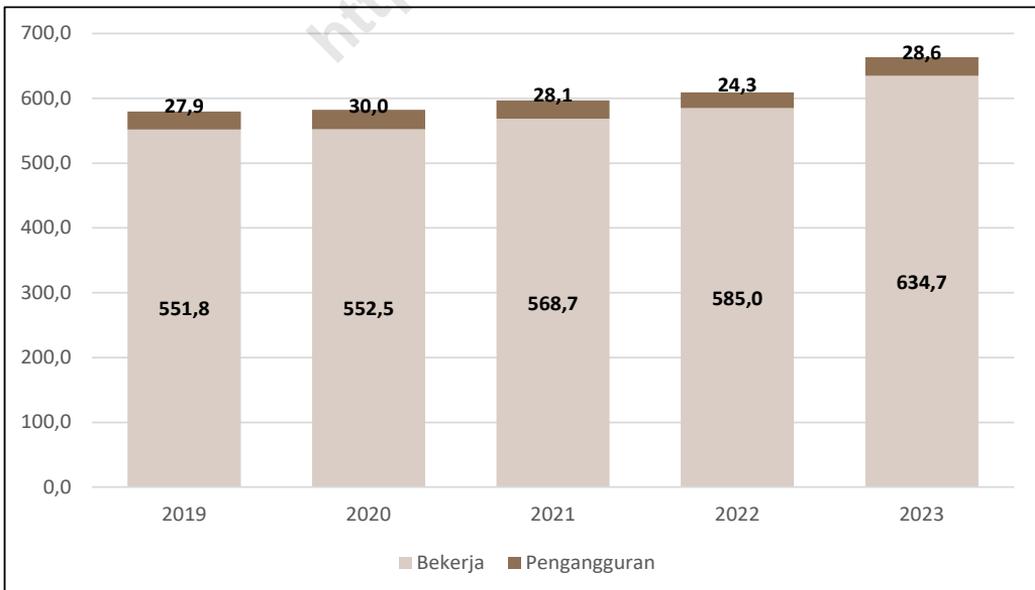
Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada Agustus 2023 mencapai 663,3 ribu orang, meningkat sebanyak 54,1 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan jumlah penduduk bekerja setiap tahunnya beriringan dengan perubahan jumlah pengangguran.

Gambar 5.9 Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas)
Maluku Utara , Agustus 2020 – 2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

Gambar 5.10 Jumlah Penduduk Bekerja dan Pengangguran Maluku Utara ,
Agustus 2019 – 2023

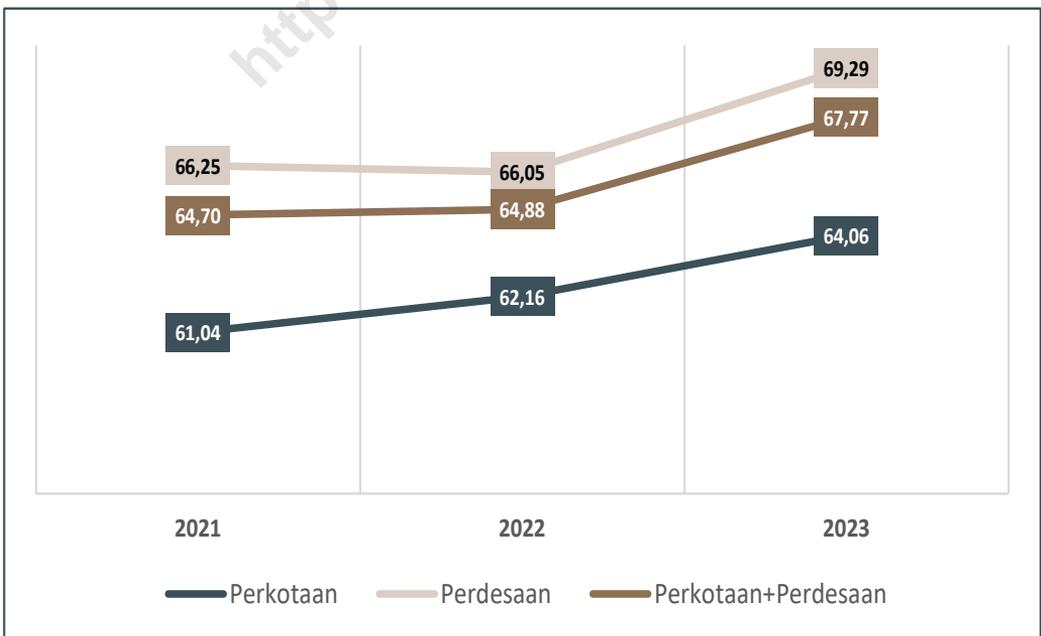


Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

Dari total angkatan kerja sebanyak 663,3 ribu orang pada Agustus 2023, sebanyak 95,69 persennya melakukan aktivitas bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2023 mencapai 634,7 ribu orang, naik 8,50 persen dari keadaan Agustus 2022.

Dari jumlah angkatan kerja tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Maluku Utara Tahun 2023 adalah sebesar 67,77 persen, mengalami peningkatan sebesar 2,88 persen poin dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur. Peningkatan ini sejalan dengan TPAK Perkotaan yang juga mengalami peningkatan sebesar 1,90 persen poin dibandingkan tahun 2022 menjadi 64,06 persen pada tahun 2023.

Gambar 5.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tipe Daerah di Maluku Utara, Agustus 2021 – 2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

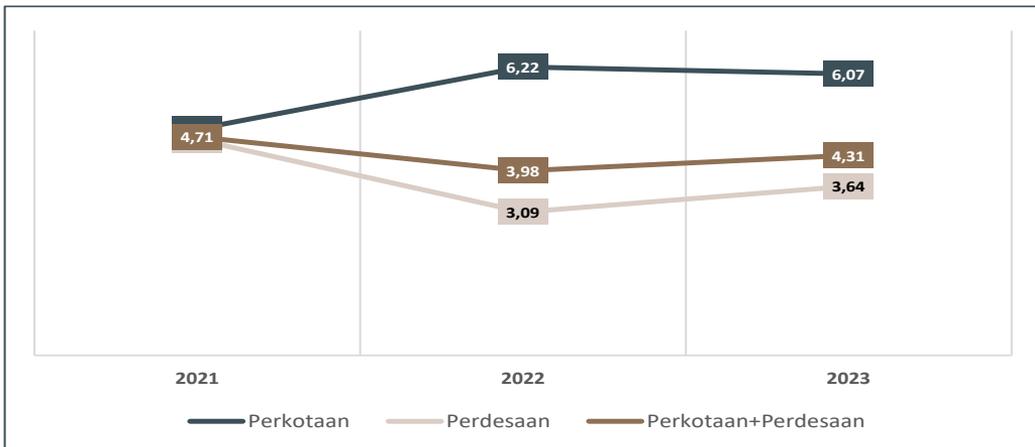
Gambar 5.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara, Agustus 2021–2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa selama periode Agustus 2021 hingga Agustus 2023, TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keadaan Agustus 2023 TPAK laki-laki di Maluku Utara mencapai 82,13 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 52,48 persen.

Gambar 5.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tipe Daerah di Maluku Utara, Agustus 2021 – 2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

Searah dengan TPAK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) keadaan Agustus 2023 di Maluku Utara meningkat jika dibandingkan keadaan Agustus 2022. Selama tahun 2021 hingga tahun 2023, TPT Maluku Utara mengalami peningkatan di wilayah perkotaan, sementara TPT di wilayah perdesaan mengalami penurunan. TPT di wilayah perdesaan pada Agustus 2023 naik sebesar 0,55 persen poin dibandingkan tahun 2022, dari 3,09 persen menjadi 3,64 persen. Sebaliknya, di wilayah perkotaan, TPT mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,15 persen poin dari 6,22 persen di tahun 2022 menjadi 6,07 persen di tahun 2023. Dengan demikian secara keseluruhan TPT di perkotaan dan perdesaan naik sebesar 0,33 persen poin dari 3,98 persen di tahun 2022 menjadi 4,31 persen di tahun 2023. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan pada tahun 2023 cukup berbeda dengan TPT di perdesaan, di mana TPT perkotaan sebesar 6,07 persen dan di perdesaan sebesar 3,64 persen.

Masih cukup tingginya tingkat pengangguran di perkotaan menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di perkotaan belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini terkait dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas dan adanya kecenderungan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Sebagian besar tenaga kerja di perdesaan terserap di sektor pertanian, di mana sektor ini memberikan kesempatan kerja yang lebih luas karena tidak perlu mempunyai keahlian khusus. Tingginya tingkat pengangguran di perkotaan juga disebabkan urbanisasi yang terjadi sehingga banyak angkatan kerja yang tadinya berada di perdesaan yang pindah ke wilayah perkotaan.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPT perempuan lebih tinggi daripada TPT laki-laki pada kondisi Agustus 2023, yaitu masing-masing 4,94 persen dan 3,94 persen. Selama periode Agustus 2021 hingga Agustus 2023 TPT laki-laki searah dengan TPT perempuan, yaitu turun di Agustus 2022 namun meningkat Kembali di Agustus 2023. Keadaan Agustus 2022, TPT laki-laki mencapai 3,80 persen, kemudian mengalami peningkatan sebesar 0,14 persen poin menjadi 3,94 persen pada Agustus 2023. Adapun TPT perempuan pada keadaan Agustus 2022 mencapai 4,31 persen kemudian naik sebesar 0,63 persen poin menjadi 4,94 persen pada keadaan Agustus 2023.

Gambar 5.14 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara, Agustus 2021– 2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

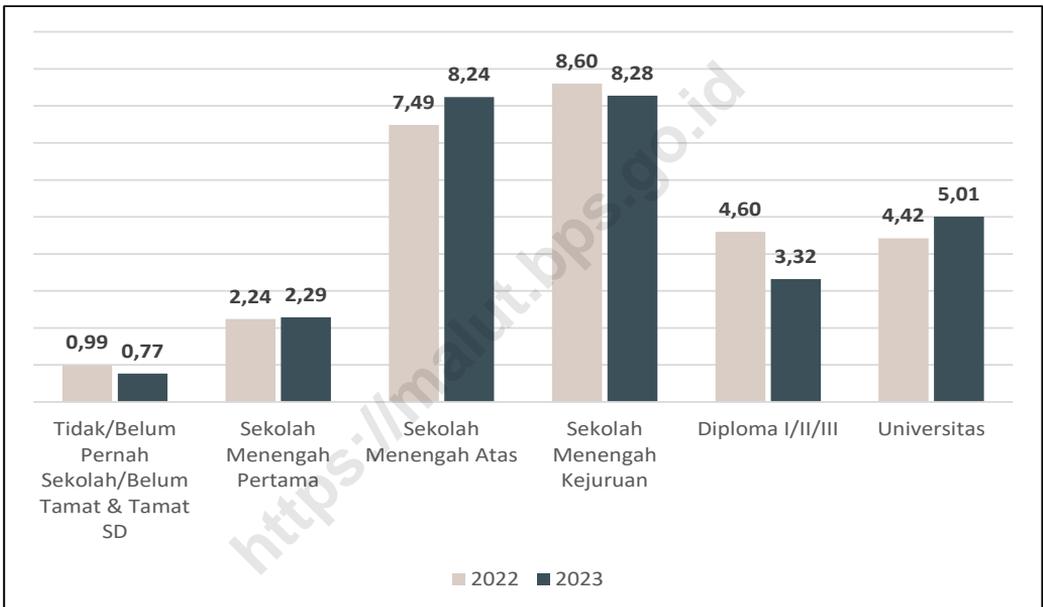
Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Dilihat dari tingkat pendidikan, terjadi peningkatan TPT untuk beberapa jenjang pendidikan, yaitu SMP, SMA dan Universitas yang masing-masing sebesar 2,29 persen, 8,24 persen dan 5,01 persen pada tahun 2023 dimana pada tahun sebelumnya masing-masing sebesar 2,24 persen, 7,47 persen dan 4,42 persen. TPT terkecil adalah penduduk dengan jenjang pendidikan SD ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa

penduduk (angkatan kerja) yang tidak punya ijazah dan penduduk berijazah SD/ sederajat akan menerima tawaran pekerjaan yang datang kepada mereka. TPT terbesar berada pada penduduk dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 8,28 persen diikuti oleh penduduk pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebesar 8,24 persen.

Gambar 5.15 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Maluku Utara, Agustus 2022-2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

Tingginya tingkat pengangguran pada penduduk berijazah SMK merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal ini dikarenakan lulusan SMK diarahkan untuk menjadi tenaga kerja siap pakai. Tingginya TPT untuk jenjang SMK menunjukkan bahwa ketersediaan jurusan pada SMK belum sepenuhnya mampu memetakan kondisi bursa lapangan pekerjaan di Maluku Utara, sehingga sebagian lulusan menganggur. Perlu upaya keras dari berbagai pihak melihat fenomena tersebut, di mana idealnya lulusan SMK akan lebih mudah dalam memasuki dunia kerja.

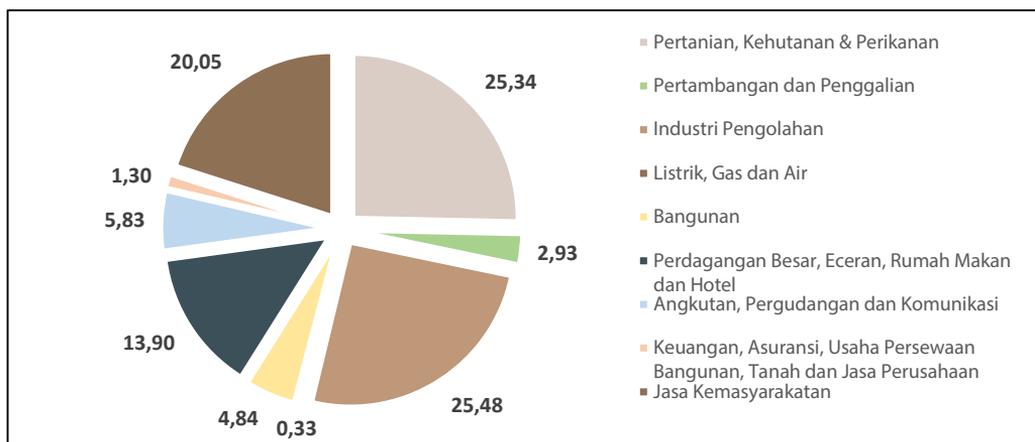
Hal tersebut diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja bagi kelompok tersebut. Dengan

pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di daerahnya sendiri akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwirausaha sehingga dapat turut serta membangun daerahnya. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwirausaha.

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 9 lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Pertambangan dan Penggalian; Industri pengolahan; Listrik, Gas dan Air; Bangunan; Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan dan Jasa Kemasyarakata. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023 terlihat bahwa mayoritas penduduk Maluku Utara bekerja pada kategori industri pengolahan, yaitu sebanyak 161,7 ribu orang (25,48 persen), diikuti oleh kategori pertanian sebanyak 160,83 ribu orang (25,34 persen).

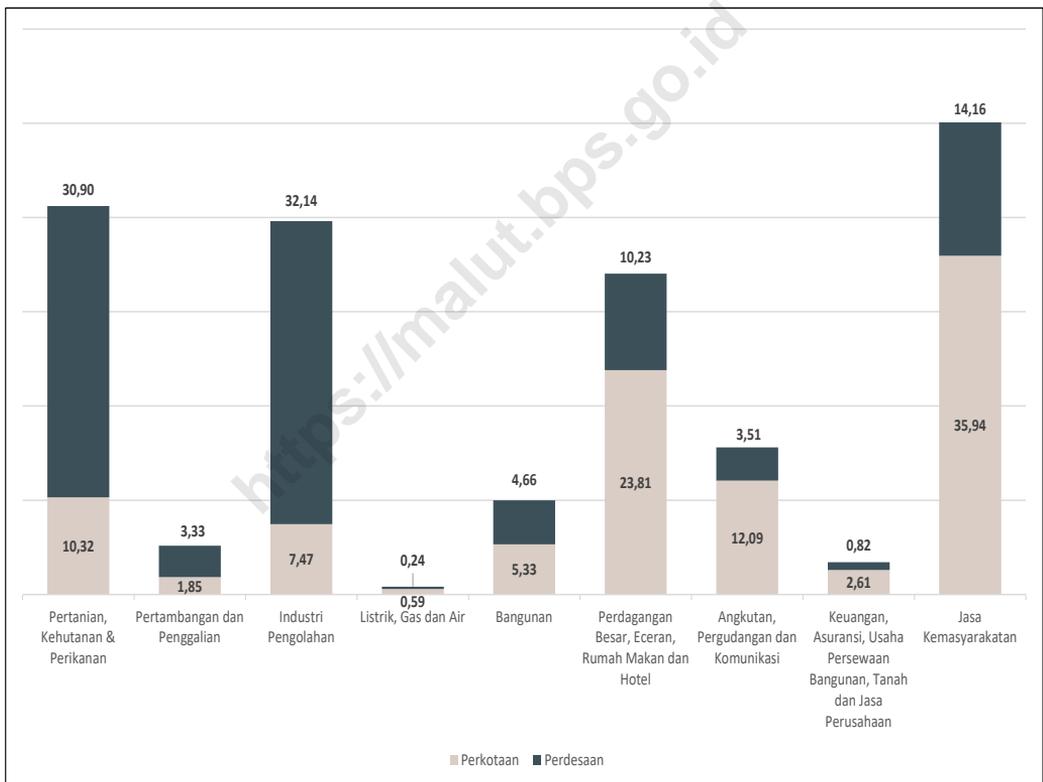
Gambar 5.16 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan di Maluku Utara, Agustus 2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah, kategori industri pengolahan mendominasi wilayah perdesaan, yaitu sebesar 32,14 persen dari total penduduk bekerja di perdesaan. Sementara untuk daerah perkotaan cenderung lebih beragam, lapangan usaha dengan jumlah penduduk bekerja tertinggi adalah jasa kemasyarakatan yaitu sebesar 35,94 persen diikuti oleh kategori Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel sebesar 23,81 persen.

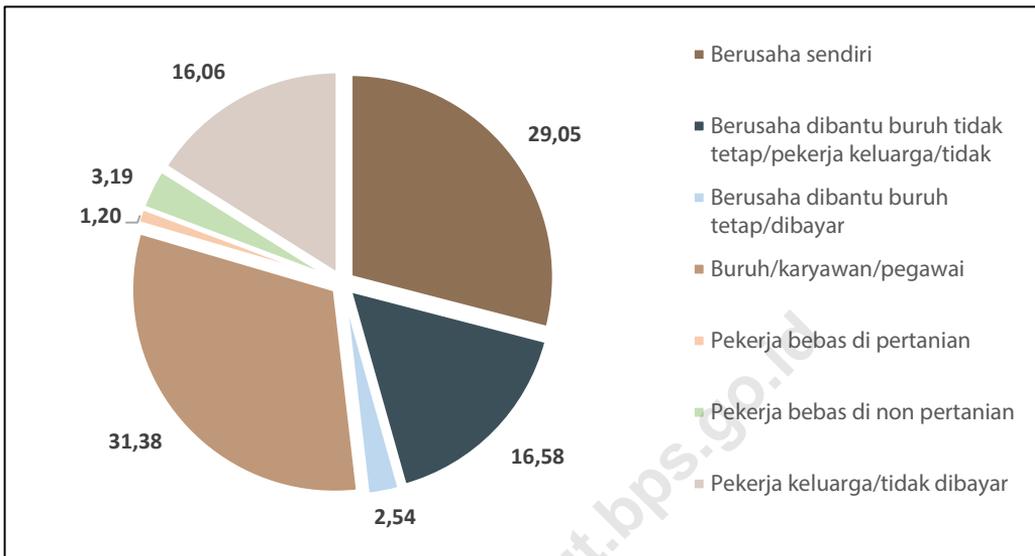
Gambar 5.17 Struktur Lapangan Usaha Penduduk Bekerja di Maluku Utara berdasarkan Tipe Daerah, Agustus 2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

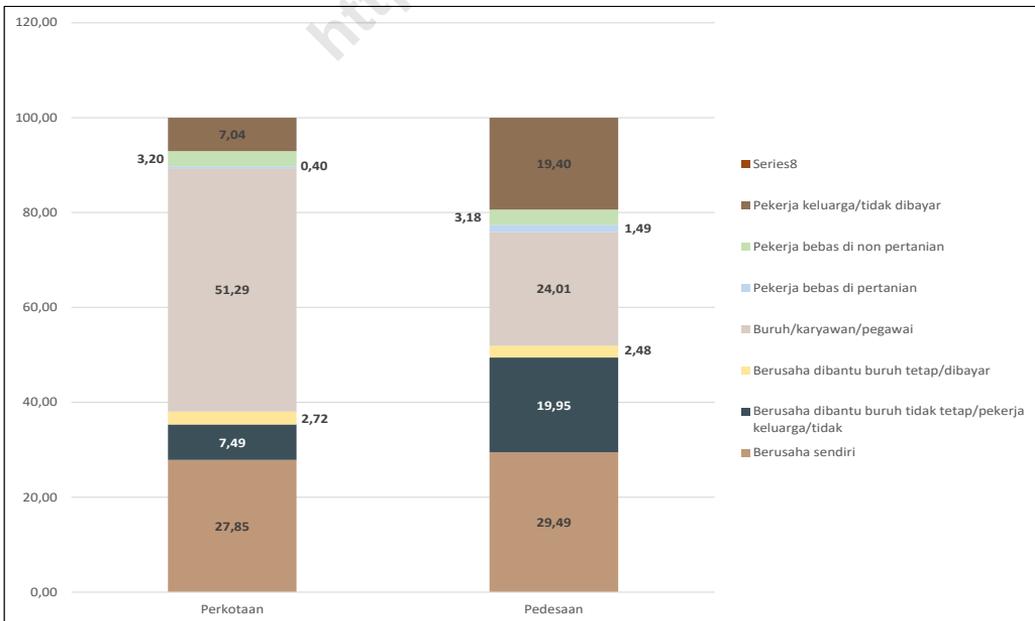
Pada Agustus 2023 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan pada Agustus 2023 mencapai 199,17 ribu orang atau sebesar 31,38 persen diikuti oleh kategori Berusaha Sendiri sebesar 29,05 persen dan Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 16,58 persen.

Gambar 5.18 Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Maluku Utara, Agustus 2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

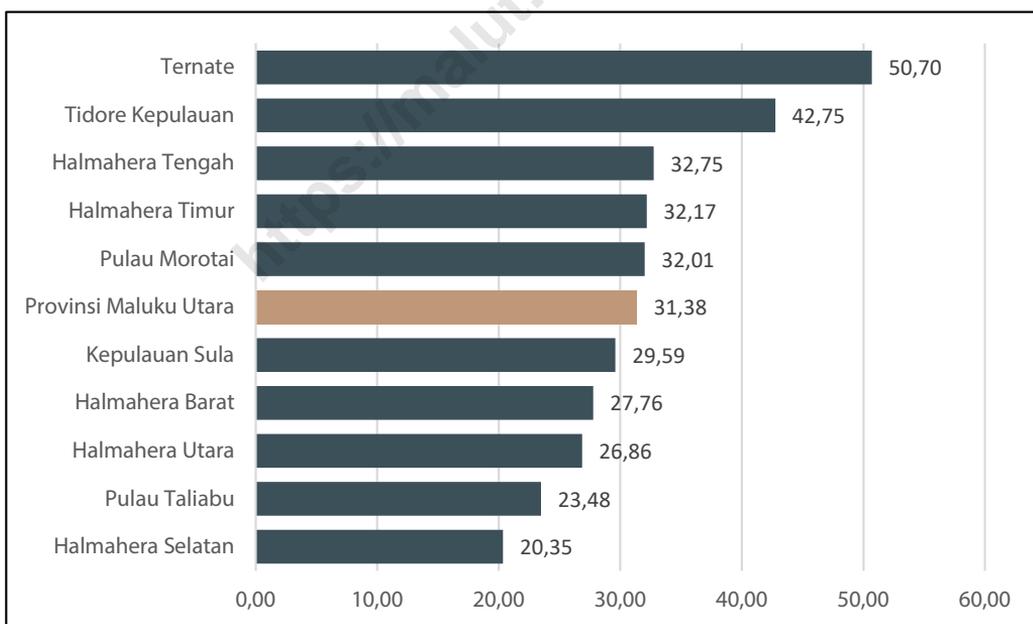
Gambar 5.19 Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Maluku Utara Menurut Tipe Daerah, Agustus 2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah, penduduk yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai mendominasi daerah perkotaan. Sebanyak 51,29 persen penduduk perkotaan bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai. Sementara penduduk perdesaan paling banyak berasal dari kategori Berusaha Sendiri, yakni sebesar 29,49 persen, diikuti oleh penduduk yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai dan Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap yang masing-masing sebesar 24,01 persen dan 19,95 persen. Status pekerjaan utama penduduk bekerja di perdesaan cenderung lebih beragam dikarenakan karakteristik pekerjaan di perdesaan yang didominasi oleh para pekerja pada sektor pertanian. Penduduk yang bekerja pada sektor tersebut, biasanya memiliki lahan pertanian sendiri sehingga terkadang tidak memerlukan pekerja tambahan atau justru mempekerjakan keluarga sendiri.

Gambar 5.20 Persentase Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

Kota Ternate mendominasi penduduk bekerja dengan jumlah Buruh/Karyawan/Pegawai terbesar di Maluku Utara, yakni mencapai 50,70 persen di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara. Sementara Halmahera Selatan menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai paling sedikit

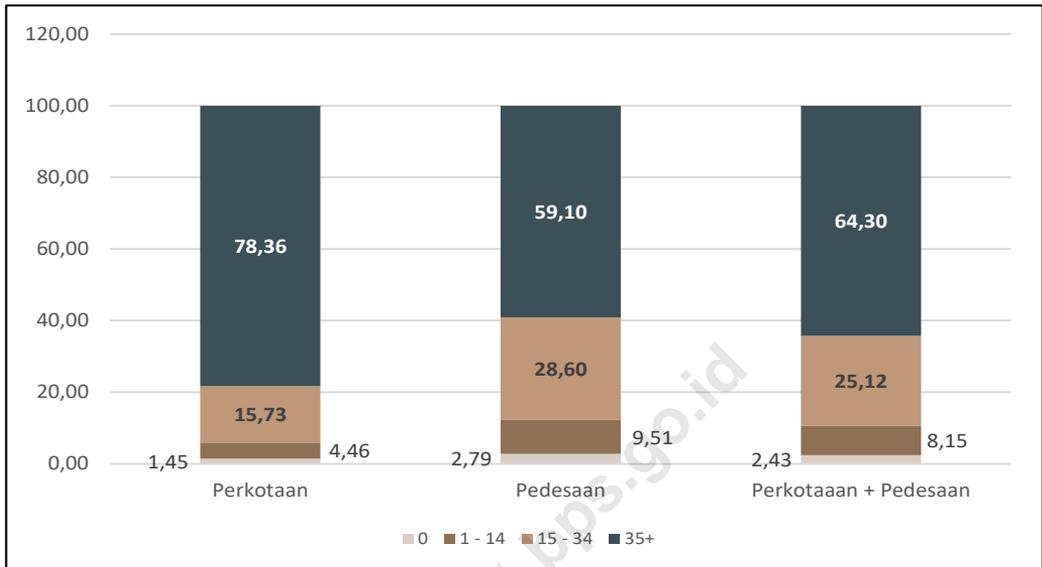
di Maluku Utara, yaitu hanya sebesar 20,35 persen. Karakteristik keduanya cukup mencerminkan kondisi pekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai karena Ternate merupakan daerah perkotaan, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di Maluku Utara sehingga banyak lapangan pekerjaan yang membutuhkan buruh/karyawan/pegawai, sementara Halmahera Selatan merupakan daerah perdesaan yang aksesnya cukup jauh dari pusat ekonomi di Maluku Utara sehingga penciptaan lapangan pekerjaan untuk buruh/karyawan/pegawai cenderung lebih kecil.

Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, berdasarkan *The Labour Force Concept* yang disarankan oleh *International Labour Organization (ILO)* seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran tidak kentara atau terselubung di mana mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya. Sementara itu, seorang pekerja yang dikategorikan sebagai bukan setengah pengangguran adalah mereka yang memiliki jumlah jam kerja normal selama seminggu (minimal 35 jam).

Keadaan Agustus 2023, secara umum jumlah jam kerja seluruhnya dari penduduk yang bekerja seminggu yang lalu sebagian besar adalah lebih dari 35 jam. Persentase pekerja yang bekerja lebih dari 35 jam selama seminggu yang lalu pada Agustus 2023 lebih dari 50 persen. Hal ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan jumlah pekerja yang bekerja sesuai jam kerja normal mencapai 78,36 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 59,10 persen. Sehingga secara rata-rata di daerah perkotaan dan perdesaan Maluku Utara jam kerja penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu bulan Agustus 2023 mencapai 64,30 persen. Penduduk yang bekerja sesuai jam kerja normal lebih banyak di daerah perkotaan. Adapun penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal lebih banyak di perdesaan.

Gambar 5.21 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Seluruhnya di Maluku Utara, Agustus 2023



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Maluku Utara 2023, BPS Provinsi Maluku Utara

5.5 Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan

semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Tipe Daerah di Maluku Utara (Rupiah), 2022

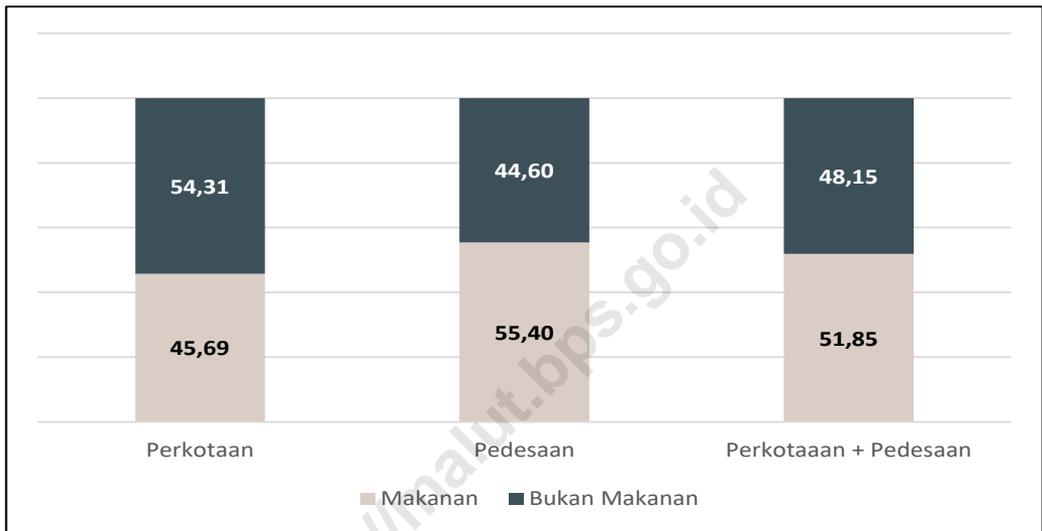
Golongan pengeluaran per Kapita (1)	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Perkotaan + Perdesaan (4)
200 000 - 299 999		290.719	290.719
300 000 - 499 999	438.530	424.764	426.491
500 000 - 749 999	635.462	636.612	636.413
750 000 - 999 999	871.516	869.562	870.000
1 000 000 - 1 499 999	1.236.574	1.201.253	1.212.397
>1 500 000	2.332.639	1.988.292	2.167.265
Rata-rata pengeluaran per kapita	1.433.881	1.005.425	1.128.586

Sumber: Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara 2022, BPS

Tabel 5.2 menyajikan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut golongan pengeluaran dan wilayah tempat tinggal. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa mayoritas penduduk di Maluku Utara memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan antara 1.000.000 – 1.499.000, yaitu sebesar 1.128.586 rupiah. Hal ini sejalan dengan kondisi rata-rata pengeluaran per kapita di perkotaan yang juga pada kisaran tersebut yakni sebesar 1.433.881 rupiah, sementara penduduk perdesaan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 1.005.425 rupiah. Hal ini

menunjukkan bahwa penduduk perkotaan lebih mendominasi golongan pengeluaran di Maluku Utara atau dengan kata lain penduduk perkotaan lebih konsumtif daripada penduduk perdesaan.

Gambar 5.22 Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran, 2022

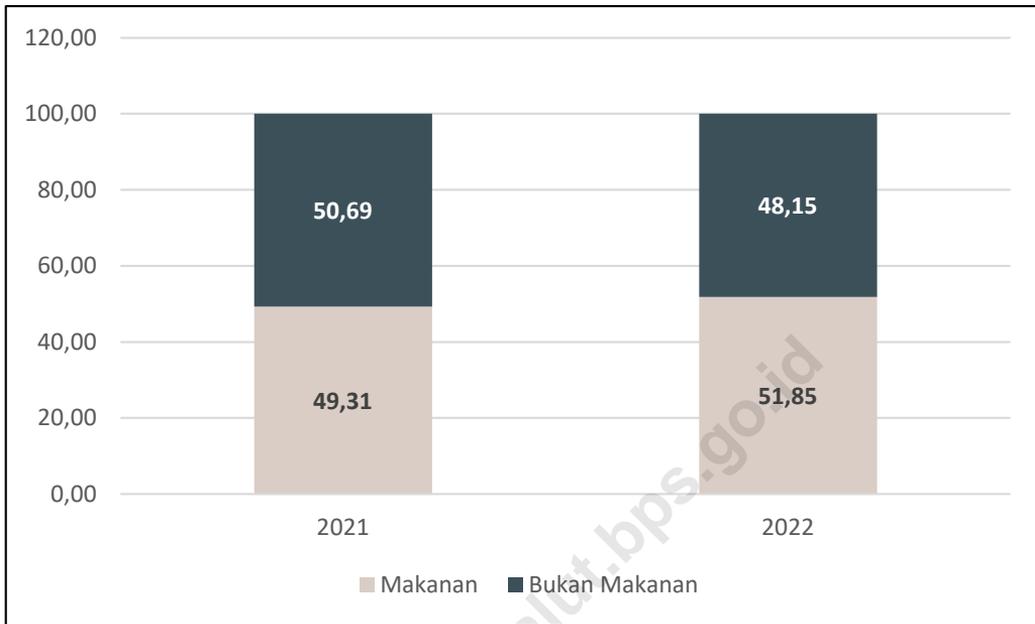


Sumber: Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara 2022, BPS

Sementara itu, berdasarkan jenis pengeluaran, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Maluku Utara cenderung dikeluarkan untuk komoditas makanan, yaitu sebesar 51,85 persen. Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah, penduduk perkotaan cenderung melakukan pengeluaran untuk komoditas non makanan, yaitu 54,31 persen. Berbeda dengan penduduk perdesaan yang lebih cenderung melakukan pengeluaran untuk komoditas makanan sebesar 52,19 persen.

Bila dilihat persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan dari 49,31 persen pada tahun 2021 menjadi 51,85 persen pada tahun 2022. Peningkatan terbesar terdapat pada komoditi buah-buahan dan diikuti dengan komoditi minyak dan lemak. Sebaliknya, pengeluaran bukan makanan mengalami penurunan dari 50,69 persen menjadi 48,15 persen. Komoditi yang mengalami penurunan terbesar adalah keperluan barang dan jasa.

Gambar 5.23 Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, 2022

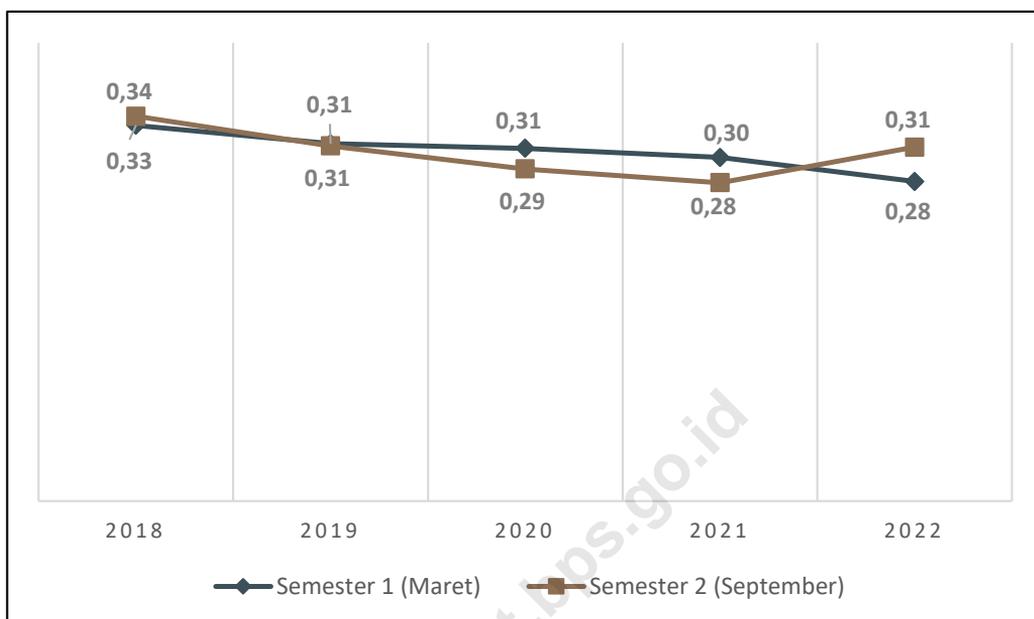


Sumber: Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara 2022, BPS

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan indikator yang sering digunakan, yaitu Indeks Gini.

Secara umum, Indeks Gini sejak Maret 2018 hingga September 2022 cenderung mengalami penurunan dari semester ke semester, yaitu berada pada kisaran 0,28 – 0,34. Hanya saja pada semester 2 tahun 2022 sempat mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0,3. Namun demikian, tingkat ketimpangan antar kelompok cenderung tidak terlalu berubah pada beberapa tahun kebelakang.

Gambar 5.24 Indeks Gini Maluku Utara, 2018 – 2022



Sumber: Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara 2022, BPS

Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Berdasarkan (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing- masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein (Kementerian Kesehatan, 2013b). Pada tahun 2022 rata-rata konsumsi kalori penduduk Maluku Utara sebesar 1.843,68 kkal per kapita per hari, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 1.862,15 kkal per kapita per hari. Penurunan konsumsi kalori tertinggi terdapat pada kelompok makanan dan minuman jadi (menurun 38,54 kkal). Namun, rata- rata konsumsi kalori per kapita

penduduk Maluku Utara cenderung masih belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk Maluku Utara 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2021 yaitu 54,76 gram per kapita per hari, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 51,59 gram per kapita per hari. Peningkatan konsumsi protein tertinggi ada pada kelompok ikan (meningkat 3,39 gram). Akan tetapi, secara rata-rata konsumsi protein penduduk Maluku Utara belum memenuhi yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu 57 gram.

Tabel 5.3 Rata-rata Konsumsi Kalori (kkal) dan Protein (gram) per Kapita per Hari Menurut Tipe Daerah di Maluku Utara, 2021 – 2022

Kategori (1)	Kalori		Protein	
	2020 (2)	2021 (3)	2020 (4)	2021 (5)
Perkotaan	1.969,85	1.804,48	58,49	57,87
Perdesaan	1.819,08	1.859,49	48,84	53,50
Perkotaan + Perdesaan	1.862,15	1.843,68	51,59	54,76

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Apabila dibandingkan menurut daerah tempat tinggal, terlihat bahwa rata-rata konsumsi kalori penduduk Maluku Utara selama kurun waktu 2021-2022 menunjukkan bahwa konsumsi protein penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, namun hal tersebut tidak berlaku untuk konsumsi kalornya, dimana penduduk perdesaan lebih tinggi. Pada tahun 2022 konsumsi kalori penduduk di perdesaan meningkat sebesar 2,22 persen menjadi 1.859,49 kkal dibandingkan tahun 2021. Begitu juga dengan konsumsi protein penduduk di perdesaan mengalami peningkatan sebesar 9,54 persen menjadi 53,5 gram di tahun 2022. Konsumsi protein penduduk yang tinggal di perkotaan lebih tinggi jika dibandingkan penduduk yang tinggal di perdesaan. Pada tahun 2022 rata-rata penduduk perkotaan mengonsumsi protein sebanyak 57,87 gram sedangkan penduduk perdesaan rata-rata hanya mengonsumsi protein sebanyak 53,5 gram.

5.6 Perumahan dan Lingkungan

Sepanjang kehidupannya, manusia selalu membutuhkan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup selain sandang dan pangan. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Pada tahun 2022, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 95,73 persen atau mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 94,77 persen.

Tabel 5.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2021-2022

Indikator Kualitas Perumahan (1)	2021 (2)	2022 (3)
Lantai bukan tanah	94,77	95,73
Atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes	97,64	98,20
Dinding terluas tembok dan kayu	98,83	99,62
Rata-rata luas lantai per kapita $\geq 10\text{m}^2$	82,38	84,90

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Selain luas lantai, indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk tempat tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Pada tahun 2021, rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes di Maluku Utara mencapai 97,64 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 98,20 persen. Selanjutnya kondisi yang sama juga terjadi pada bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu, meningkat dari 82,38 persen menjadi 84,90 persen pada tahun 2022.

Menurut standar *World Health Organization (WHO)* tentang rumah layak huni menyebutkan bahwa rumah yang sehat adalah rumah dengan luas per kapitanya 10m^2 . Artinya dengan asumsi satu rumahtangga terdiri dari 4 (empat) orang maka rumah yang sehat menurut ukuran WHO, rumahtangga tersebut harus memiliki rumah idealnya minimal dengan luas 40m^2 . Pada tahun 2022, rumahtangga dengan luas perkapita minimal 10m^2 sebesar 84,90 persen atau mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 82,38 persen.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitasnya, diantaranya tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih yang tersedia dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum merupakan tujuan dari program

penyediaan air bersih yang terus-menerus diusahakan pemerintah.

Rumah tangga di Maluku Utara tahun 2022 yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum mencapai 42,28 persen. Terdapat penurunan persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 43,83 persen. Selanjutnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2022 mencapai 66,89 persen menurun sebesar 5,47 persen dibandingkan tahun 2021. Air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, air ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja lebih dari 10 m.

Tabel 5.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan, 2021–2022

Indikator (1)	2021 (2)	2022 (3)
Air kemasan, air isi ulang dan ledeng	43,83	42,28
Air minum bersih	70,76	66,89
Jamban sendiri	69,73	74,02
Sumber penerangan listrik PLN	88,36	90,98

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Selama tahun 2021-2022 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri meningkat dari 69,73 persen menjadi 74,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan jamban sendiri sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Selanjutnya selain telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat.

Selain air bersih dan jamban, fasilitas rumah tinggal lainnya yang juga penting adalah penerangan. Secara umum sumber penerangan yang utama berasal dari listrik baik PLN maupun non-PLN. Cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Pada tahun 2022, 90,98 persen rumah tangga di Maluku Utara telah menikmati fasilitas penerangan PLN, jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2021 (88,36 persen).

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 5.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2021–2022

Indikator (1)	2021 (2)	2022 (3)
Milik sendiri	83,40	89,41
Kontrak/sewa	6,67	2,67
Bebas sewa	8,47	7,16
Rumah dinas/lainnya	1,46	0,76

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 89,41 persen. Adapun sisanya 10,59 persen menempati rumah bukan milik sendiri yang terdiri dari 2,67 persen kontrak/sewa, 7,16 persen bebas sewa dan 0,76 persen rumah dinas/lainnya.

5.7 Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi permasalahan yang kompleks dan multidimensional di setiap daerah. Upaya pengentasan kemiskinan agaknya dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian

masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, di mana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

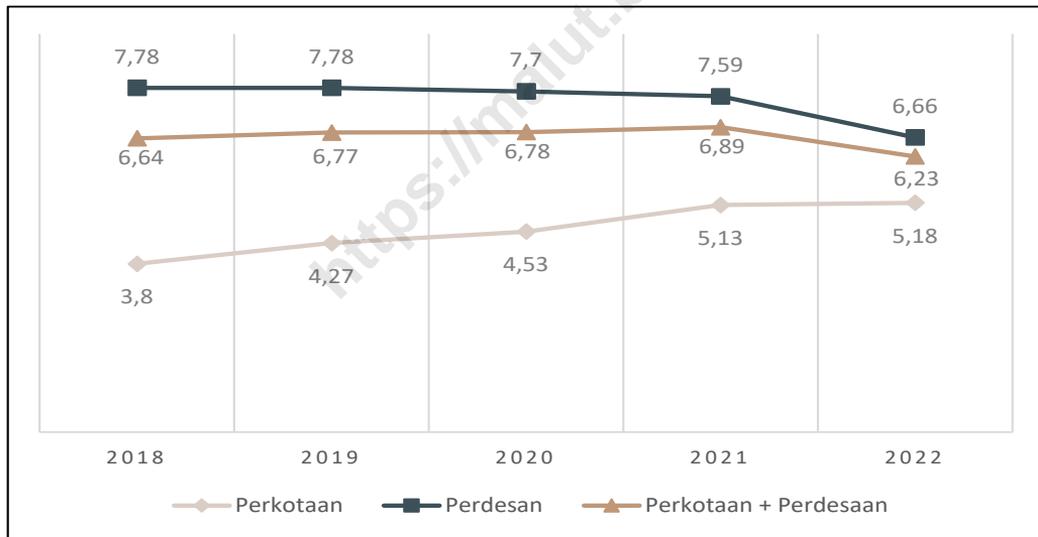
Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai pengganti *Millenium Development Goals (MDGs)* merupakan agenda pembangunan pasca *MDGs* yang berakhir tahun 2016. Target yang pertama dari *SDGs* adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang

yang hidup kurang dari \$1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.

Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Maluku Utara secara total dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan, namun di tahun 2022 berhasil turun mencapai angka terendah selama lima tahun terakhir. Tahun 2018, jumlah penduduk miskin sebesar 81,5 ribu jiwa atau 6,64 persen dari jumlah seluruh penduduk Maluku Utara. Hingga Maret tahun 2022 jumlah penduduk miskin berhasil turun menjadi 79,9 ribu jiwa atau 6,23 persen dari jumlah penduduk Maluku Utara.

Gambar 5.25 Persentase Penduduk Miskin di Maluku Utara, 2018–2022 (Maret)



Sumber: Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

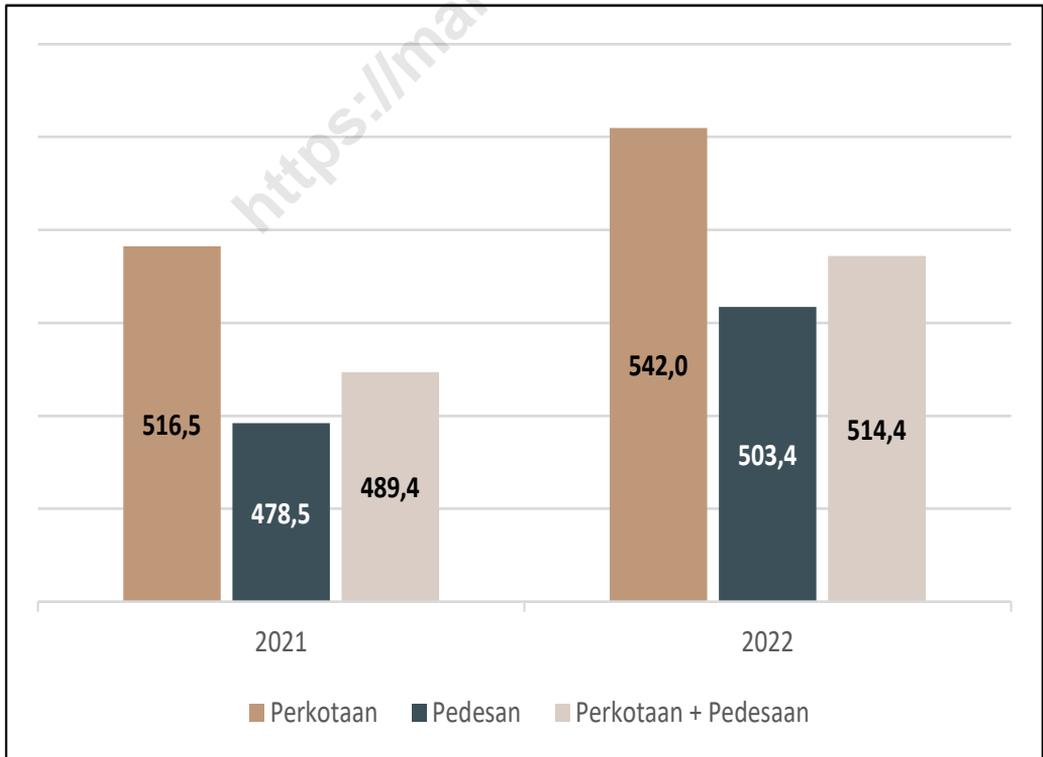
Jika ditinjau berdasarkan tipe daerah tempat tinggal, penduduk miskin lebih banyak tinggal di daerah perdesaan dibanding daerah perkotaan. Tahun 2018, jumlah penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 68,1 ribu jiwa atau 7,78 persen dari total penduduk dan di tahun 2022 turun menjadi 60,8 ribu jiwa dengan persentase terhadap jumlah penduduk menurun menjadi sebesar 6,7 persen. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tahun 2018 sebesar 13,3

ribu jiwa atau 3,80 persen dari total penduduk dan di tahun 2022 meningkat menjadi 19,1 ribu jiwa (5,18 persen).

Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Maluku Utara mengalami peningkatan selama periode 2021-2022, tahun 2021 sebesar 489,4 ribu rupiah dan di tahun 2022 sebesar 514,4 ribu rupiah. Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding daerah perdesaan. Selisih garis kemiskinan antara daerah perkotaan dan perdesaan tahun 2021-2022 adalah sebesar 38,0 ribu rupiah di September 2021 dan 38,6 ribu rupiah di Maret 2022.

Gambar 5.26 Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di Maluku Utara, 2021-2022 (Ribu Rupiah/Kapita/Bulan)

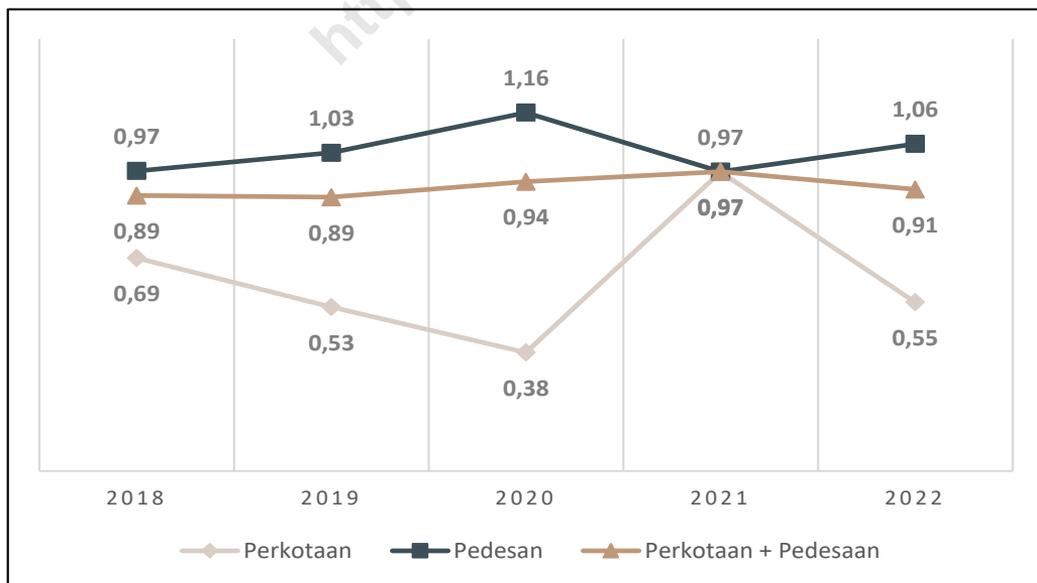


Sumber: Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2018 – 2022, P1 cenderung menunjukkan trend peningkatan di mana pada tahun 2018 sebesar 0,89, kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi 0,91. Nilai P1 yang semakin tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Diharapkan pada masa yang akan datang nilai P1 akan semakin kecil, sehingga penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin. Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, P1 di daerah pedesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Hal ini mencerminkan masih banyak penduduk miskin di pedesaan yang rata-rata pengeluarannya lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding penduduk miskin di perkotaan. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih diprioritaskan di daerah pedesaan untuk dapat membebaskan penduduk dengan kondisi miskin “terlalu dalam”.

Gambar 5.27 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Tipe Daerah di Maluku Utara, 2018-2022

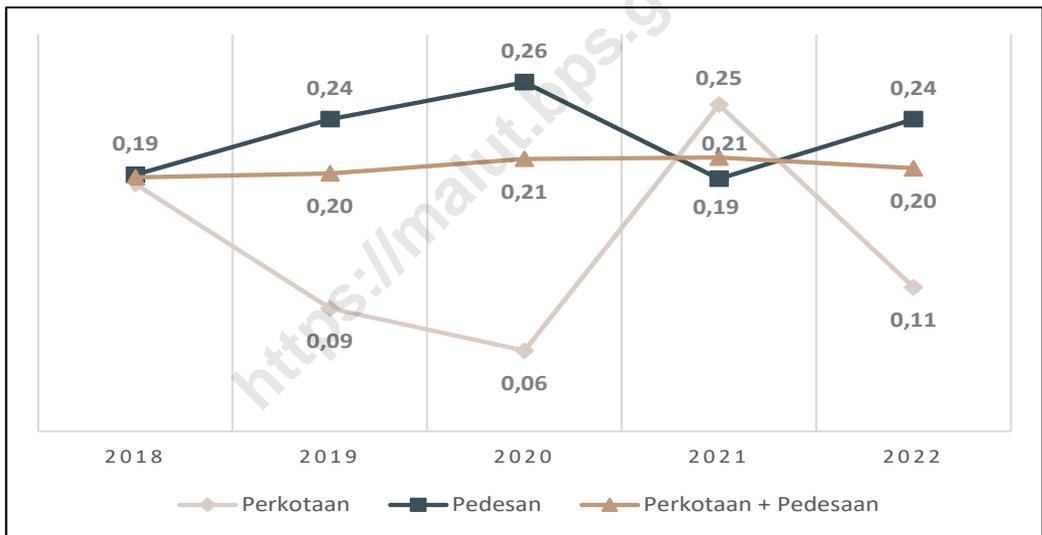


Sumber: Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Indeks Keperahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga mengalami kecenderungan untuk meningkat di mana pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga tahun 2021 dan menurun di tahun 2022. Nilai P2 pada tahun 2018 sebesar 0,91 dan sebesar 0,20 di tahun 2022. Peningkatan nilai indeks menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin besar. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 5.28 Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Menurut Tipe Daerah di Maluku Utara, 2018-2022



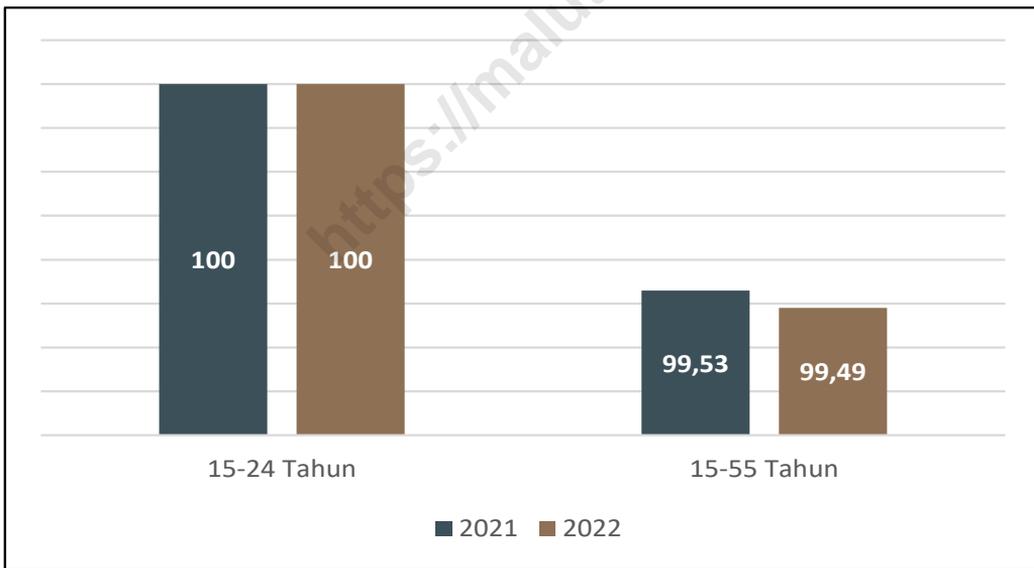
Sumber: Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Nilai P2 di daerah pedesaan cenderung lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan lebih tinggi dibanding penduduk miskin yang tinggal di perkotaan. Akan tetapi, ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2021 lebih tinggi daripada penduduk pedesaan, yakni mencapai 0,25 dan di daerah pedesaan sebesar 0,19. Namun di tahun 2022 Nilai P2 penduduk pedesaan Kembali lebih tinggi dibandingkan penduduk perkotaan dengan nilai P2 penduduk pedesaan sebesar 0,24 sedangkan penduduk perkotaan sebesar 0,11.

Karakteristik Pendidikan

Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung mengupayakan anggota rumah tangga yang dipimpinnya juga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga cenderung akan memiliki tingkat pendapatan yang semakin tinggi, dan semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada dalam kondisi miskin. Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pengentasan kemiskinan selain pendidikan kepala rumah tangga yaitu pendidikan anak dari rumah tangga miskin. Anak dalam rumah tangga miskin apabila diberi kesempatan menempuh pendidikan yang memadai maka besar kemungkinan untuk keluar dari kemiskinannya di masa depan.

Gambar 5.29 Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Maluku Utara, 2021-2022

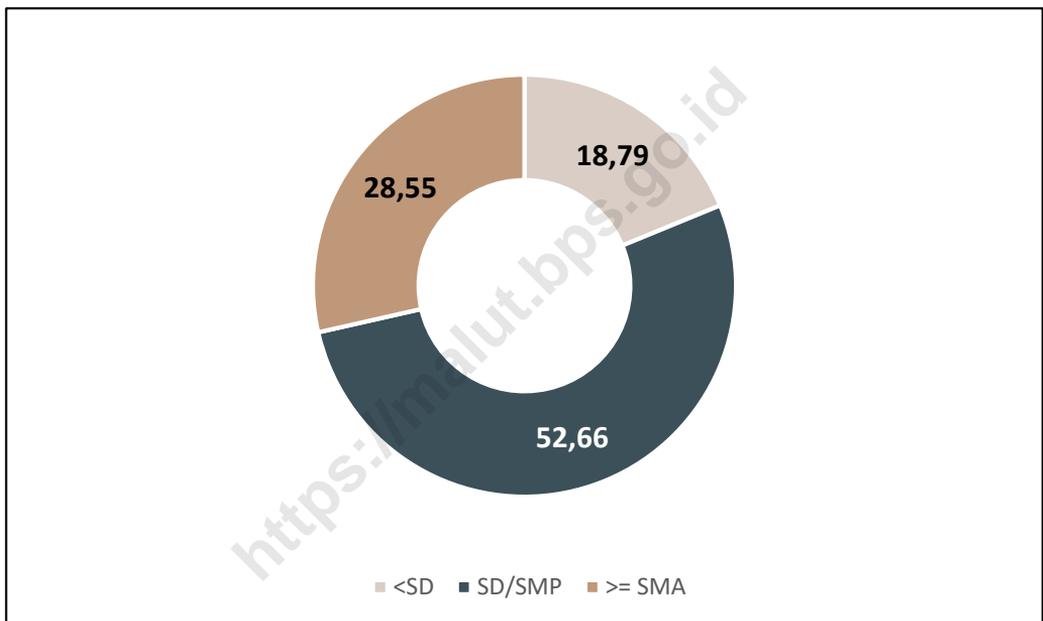


Sumber: Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Salah satu indikator pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH). AMH menggambarkan proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Dalam publikasi ini AMH dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok usia 15 – 24 tahun dan usia 15 – 55 tahun. Pada tahun 2022 AMH penduduk miskin usia 15 – 24 tahun yaitu 100, artinya diyakini bahwa

seluruh penduduk miskin usia 15 – 24 tahun di Maluku Utara dapat membaca dan menulis dengan kalimat sederhana. Sementara untuk kelompok usia 15 – 55 tahun, AMH penduduk miskin pada tahun 2022 adalah sebesar 99,49. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,04 persen poin jika dibandingkan dengan AMH usia 15 – 55 tahun pada tahun 2021.

Gambar 5.30 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Maluku Utara, 2022



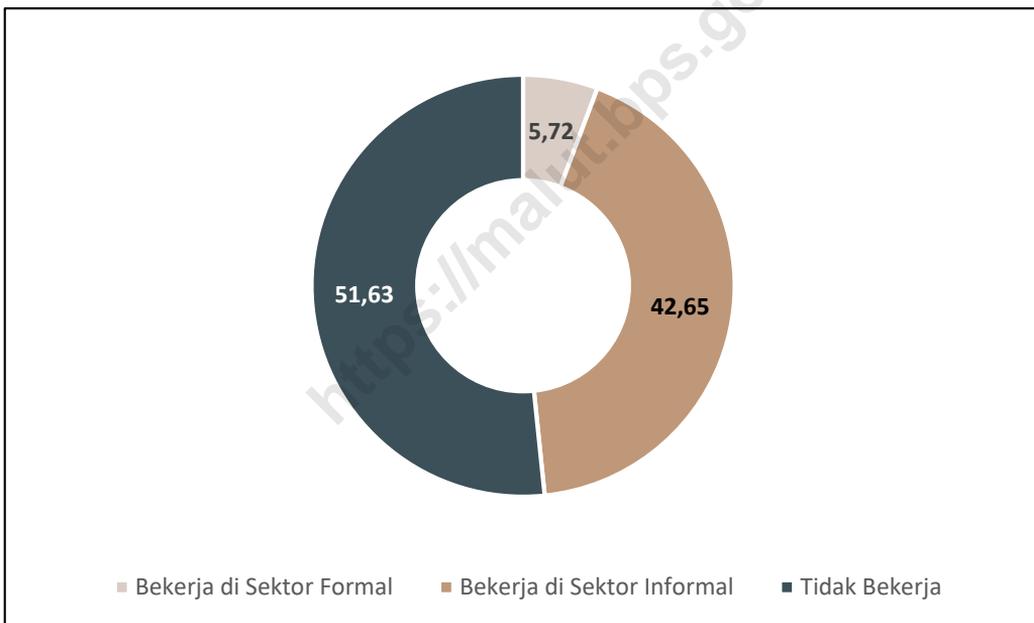
Sumber: Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Selain AMH, indikator pendidikan lainnya adalah pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Maluku Utara. Pada tahun 2022, pendidikan yang paling banyak ditamatkan oleh penduduk miskin di Maluku Utara berada pada jenjang SD/SMP yakni sebesar 52,66 persen. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA ke atas yang ditamatkan sebesar 28,55 persen, lebih besar daripada penduduk miskin yang tidak menamatkan SD atau bahkan tidak pernah sekolah, yaitu sebesar 18,79 persen.

Karakteristik Ketenagakerjaan

Indikator kedua setelah pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin yaitu ketenagakerjaan. Persentase penduduk miskin yang tidak bekerja di Maluku Utara mencapai 51,63 persen pada tahun 2022. Angka ini termasuk penduduk yang berstatus pengangguran dan bukan angkatan kerja. Sementara itu, sebesar 42,65 persen penduduk miskin di Maluku Utara bekerja pada sektor informal. Kemudian sebesar 5,72 persen penduduk miskin Maluku Utara bekerja pada sektor formal.

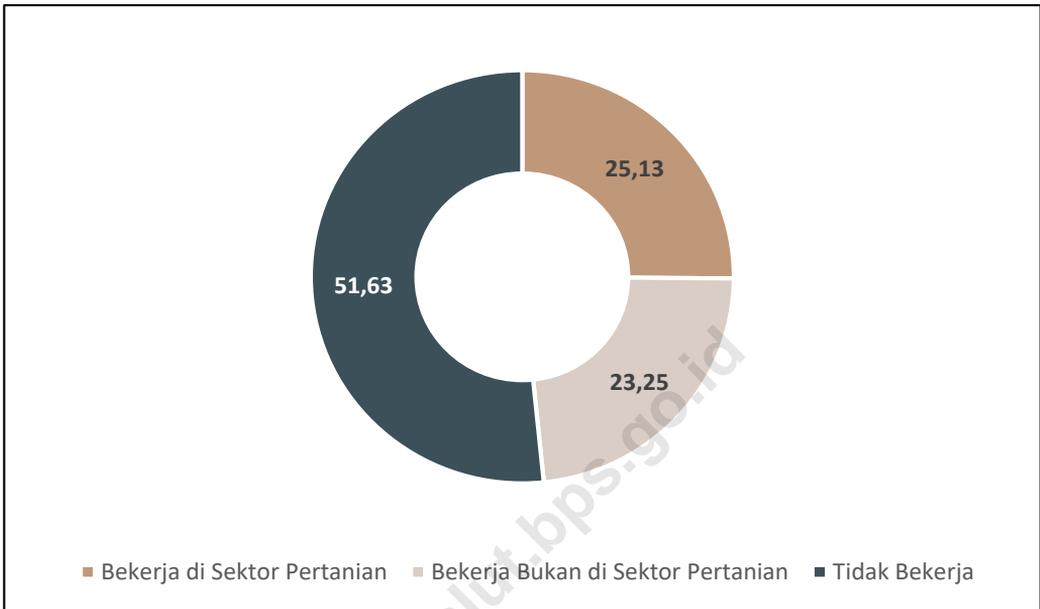
Gambar 5.31 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Maluku Utara, 2022



Sumber: Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2022 mencapai 25,13 persen, sementara penduduk yang tidak bekerja pada sektor pertanian adalah sebanyak 23,25 persen. Hal ini sejalan dengan tingginya angka kemiskinan pada penduduk perdesaan, dimana mayoritas penduduk perdesaan di Maluku Utara bekerja pada sektor pertanian.

Gambar 5.32 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 tahun ke Atas Menurut Bidang Pekerjaan di Maluku Utara, 2022



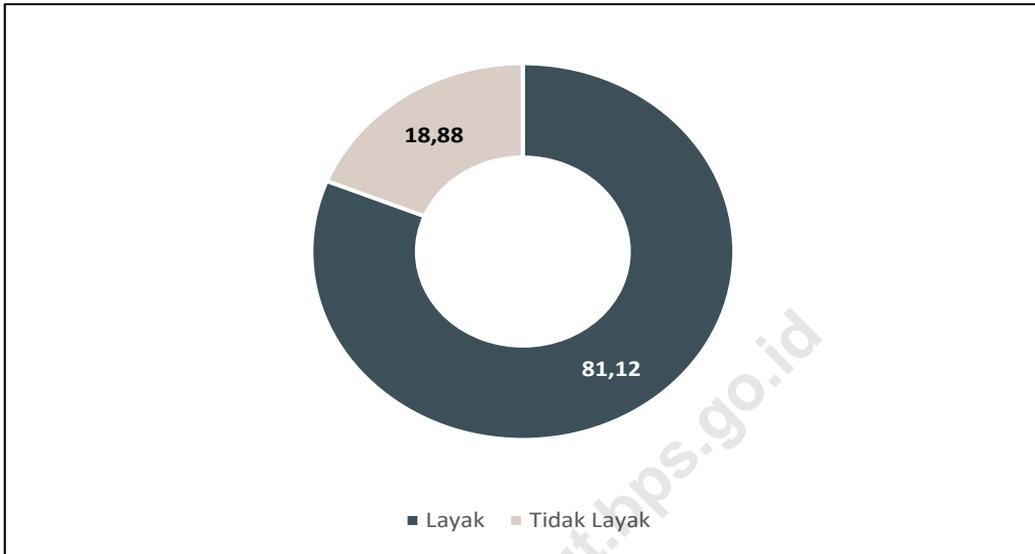
Sumber: Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Karakteristik Perumahan

Karakteristik rumah tangga miskin yang tak kalah penting untuk diperhatikan selain pendidikan dan ketenagakerjaan adalah perumahan. Rumah tangga miskin memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang besar. Tingginya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin menimbulkan persoalan baru mengenai pengelolaan wilayah perumahan bahkan sanitasi yang dimiliki. Rumah tangga miskin cenderung mengalami permasalahan pada pengelolaan sanitasi.

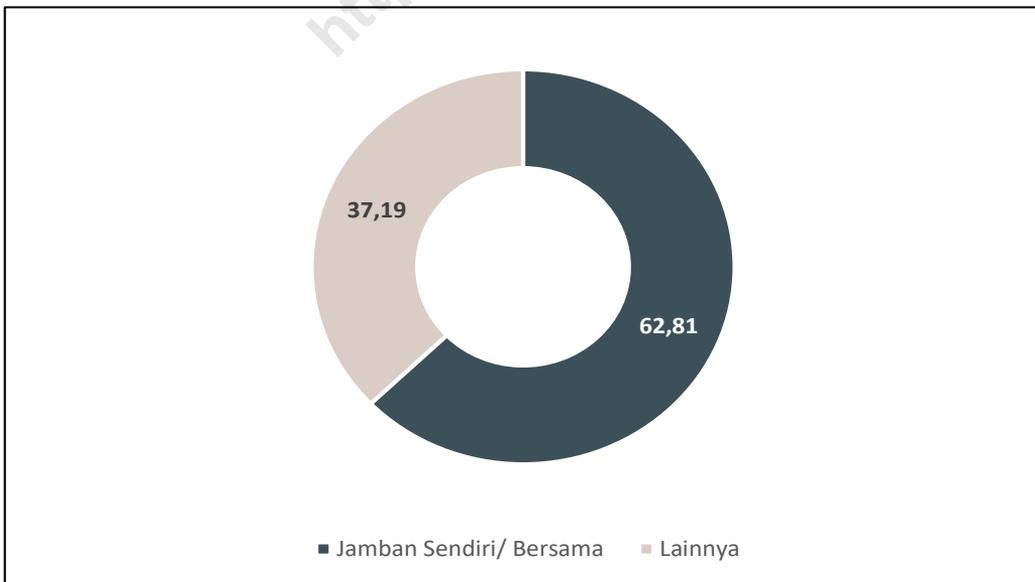
Ketersediaan fasilitas air minum dan jamban merupakan beberapa karakteristik perumahan yang perlu mendapat perhatian. Di Maluku Utara, pada tahun 2022, penggunaan air layak oleh penduduk miskin di Maluku Utara mencapai 81,12 persen. Sementara itu sebesar 18,88 persen penduduk miskin lainnya belum menggunakan air layak. Dalam publikasi ini air layak adalah air yang sumber utama air minum berasal dari air tidak suatain (air hujan), air terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/cuci/dll yang digunakan berasal dari air terlindung.

Gambar 5.33 Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Air Layak di Maluku Utara Tahun 2022



Sumber: Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Gambar 5.34 Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Jamban Milik Sendiri/Bersama di Maluku Utara Tahun 2022



Sumber: Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Selain ketersediaan air minum layak, ketersediaan sanitasi untuk setiap rumah tangga miskin di Maluku Utara juga masih belum memadai. Jamban merupakan salah satu sarana perumahan yang sedianya harus dimiliki oleh seluruh rumah tangga. Penggunaan jamban yang tidak sesuai standar kesehatan akan berdampak buruk pada kesehatan anggota rumah tangga.

Penggunaan jamban di masyarakat terbagi menjadi jamban milik sendiri dan jamban bersama yang digunakan secara terbatas oleh dua hingga empat rumah tangga saja, jamban umum yang diperuntukkan secara umum dan tidak memiliki jamban. Penduduk miskin Maluku Utara yang menggunakan fasilitas jamban sendiri/bersama hanya sebesar 62,81 persen. Sementara itu sisanya sebesar 37,19 persen penduduk menggunakan cara lainnya. Hal ini cukup mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan kondisi air bersih yang secara umum masih kurang layak.

5.8 Sosial Lainnya

Selain aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi dan perumahan, masih ada indikator sosial lainnya yang tidak termasuk dalam enam aspek tersebut yang juga mencerminkan kesejahteraan. Indikator tersebut diantaranya: persentase penduduk yang melakukan berpergian, persentase penduduk yang menguasai media teknologi komunikasi dan informasi seperti telepon seluler dan komputer, persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, serta persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan.

Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana komunikasi tidak kalah pesat perkembangannya. Penggunaan telepon seluler sebagai sarana atau alat komunikasi pada saat ini lebih populer di kalangan masyarakat dibandingkan telepon biasa, meskipun harga telepon seluler maupun pulasanya lebih mahal. Telepon seluler banyak diminati karena lebih praktis dibawa ke mana saja sehingga memudahkan pengguna berkomunikasi di manapun berada dengan ditunjang oleh jangkauan jaringan yang semakin meluas.

Tabel 5.7 Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi, 2021–2022

Indikator (1)	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2021 (2)	2022 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2021 (6)	2022 (7)
Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel	76,80	77,92	72,20	74,55	74,54	76,26
PC/Komputer, Laptop/ Notebook, Tablet	10,06	9,27	8,96	9,54	9,52	9,40

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sekarang ini sangat terlihat jelas pada peningkatan penggunaan alat komunikasi seperti telepon seluler dan komputer. Perkembangan telepon seluler yang cukup pesat menyebabkan masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis dapat dibawa kemana-mana, lebih bersifat pribadi, tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler untuk mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih banyak menggunakan telepon seluler dibandingkan penduduk perempuan. Hal yang sama juga terlihat dalam penggunaan PC/komputer, dimana pada tahun 2022 terdapat 9,27 persen penduduk laki-laki yang menggunakan PC/komputer, sedangkan penduduk perempuan hanya sebesar 9,54 persen.

Penerima Jaminan Sosial

Hasil Susenas 2022 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menerima jaminan sosial paling banyak menggunakan jaminan pensiun/veteran (7,40 persen). Hal ini disebabkan kategori ini mencakup pelayanan kesehatan gratis yang didapat dari fasilitas BPJS Kesehatan bagi pegawai negeri sipil/pensiunan. Sementara itu pemanfaatan asuransi kecelakaan kerja menunjukkan persentase sebesar 6,68 persen. Rumah tangga yang memanfaatkan jaminan hari tua, jaminan asuransi kematian dan Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), masing-masing sebanyak 6,60 persen, 6,35 persen dan 1,88 persen.

Tabel 5.8 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir, 2021–2022

Indikator (1)	2021 (2)	2022 (3)
Jaminan pensiunan/veteran	9,10	7,40
Jaminan hari tua	8,36	6,60
Asuransi kecelakaan kerja	8,98	6,68
Jaminan asuransi kematian	8,76	6,35
Pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK)	2,82	1,88

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Tindak Kejahatan

Selain bantuan kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, tingkat keamanan wilayah juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Penduduk yang termasuk dalam korban kejahatan yang dicakup dalam Susenas 2022 ini adalah semua bentuk korban kejahatan kecuali kejahatan kasus pembunuhan karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota rumah tangga lagi.

Tabel 5.9 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan, 2021–2022

Tahun (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
2021	1,47	0,64	1,06
2022	0,65	0,45	0,55

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

Selama tahun 2022 penduduk yang menjadi korban kejahatan mengalami penurunan menjadi 0,55 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai dari 1,06 persen. Berdasarkan jenis kelamin, korban kejahatan terbanyak masih dialami oleh laki-laki sebesar 1,47 persen sedangkan perempuan 0,65 persen di tahun 2021. Walaupun secara persentase menurun, di tahun 2022 korban kejahatan terbanyak masih dialami oleh laki-laki dengan persentase sebesar 0,65 persen sedangkan perempuan 0,45 persen.

<https://malut.bps.go.id>

DARTAR PUSTAKA

- Baltagi, Badi H. (2011). *Econometrics Fifth Edition*. New York: Springer Heidelberg Dordrecht London
- Wardiansyah, M, dkk. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran (Studi kasus provinsi-provinsi se-Sumatera). *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 5. No.1*.
- Firdhania, R & Muslihatiningsih, F. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (1) : 117-12*.
- BPS. (2022). Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Maluku Utara Agustus 2022. Ternate: BPS Provinsi Maluku Utara
- BPS. (2022). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2022. Ternate: BPS Provinsi Maluku Utara
- Apriani, Resty dkk. (2022). Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2022. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
- Himo, J T, dkk. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di 4 Kabupaten Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 22(4)*.
- BPS. (2023). Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2023. Ternate: BPS Provinsi Maluku Utara
- BPS. (2023). Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara 2020-2035. Ternate: BPS Provinsi Maluku Utara
- Kristian B.P, Raynard. (2023). "Maluku Utara Perlu Genjot Sektor Nontambang". Kompas.com, 30 Oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/30/ketimpangan-maluku-utara-menajam-ertumbuhan-sektor-non-tambang-diperlukan>.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Utara. Ternate: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.

LAMPIRAN

<https://malut.bp.go.id>

6

LAMPIRAN 1. Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara, 2018-2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Maluku Utara				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	116.513	118.287	132.349	134.630	137.541
Halmahera Tengah	54.190	55.728	56.802	57.809	59.096
Kepulauan Sula	100.967	102.886	104.082	105.293	106.778
Halmahera Selatan	231.217	235.090	248.395	251.690	255.795
Halmahera Utara	190.531	193.851	197.638	199.936	202.755
Halmahera Timur	92.618	95.005	91.707	92.954	94.510
Pulau Morotai	65.573	67.284	74.436	76.102	78.270
Pulau Taliabu	52.503	53.018	58.047	58.744	59.601
Ternate	228.105	233.208	205.001	205.870	206.745
Tidore Kepulauan	100.415	101.414	114.480	116.149	118.247
Maluku Utara	1.232.632	1.255.771	1.282.937	1.299.177	1.319.338

Data tahun 2018-2019 : Hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 (pertengahan tahun/Juni)

Data tahun 2020 : Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 September

Data tahun 2021-sekarang : Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber : Proyeksi Sensus Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara 2018–2022, Badan Pusat Statistik

LAMPIRAN 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Maluku Utara, 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2022		Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	70.096	67.445	103,93
Halmahera Tengah	31.346	27.750	112,96
Kepulauan Sula	54.292	52.486	103,44
Halmahera Selatan	132.543	123.252	107,54
Halmahera Utara	103.434	99.321	104,14
Halmahera Timur	48.820	45.690	106,85
Pulau Morotai	40.364	37.906	106,48
Pulau Taliabu	30.613	28.988	105,61
Ternate	103.844	102.901	100,92
Tidore Kepulauan	59.779	58.468	102,24
Maluku Utara	675.131	644.207	104,80

Data tahun 2022-sekarang : Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber : Proyeksi Sensus Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara 2018–2022, Badan Pusat Statistik

LAMPIRAN 3. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut kab/kota Dan Berat Badan Anak Lahir Hidup Ketika dilahirkan, 2022

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut kab/kota Dan Berat Badan Anak Lahir Hidup Ketika dilahirkan, 2022			
	< 2,5 Kg	>= 2,5 Kg	Tidak Ditimbang	Tidak Tahu Ditimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	13,10	81,94	1,45	3,51
Halmahera Tengah	12,54	78,62	4,96	3,87
Kepulauan Sula	24,58	41,14	21,61	12,67
Halmahera Selatan	16,29	77,85	2,10	3,75
Halmahera Utara	28,51	55,81	11,87	3,81
Halmahera Timur	22,76	57,58	8,81	10,85
Pulau Morotai	22,80	66,58	2,63	7,99
Pulau Taliabu	7,70	49,47	36,02	6,81
Ternate	17,28	80,03	0,00	2,68
Tidore Kepulauan	16,52	75,24	3,16	5,08
Maluku Utara	19,19	68,15	7,27	5,39

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

LAMPIRAN 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku Utara, 2020-2022

Kabupaten/Kota	TPAK			TPT		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	64,66	64,88	70,21	3,26	3,26	3,45
Halmahera Tengah	68,77	63,02	70,81	6,74	4,23	3,06
Kepulauan Sula	59,44	63,76	58,29	4,90	2,78	2,10
Halmahera Selatan	68,25	68,87	67,43	4,40	1,94	1,51
Halmahera Utara	61,98	64,39	66,88	6,49	8,01	6,06
Halmahera Timur	66,18	64,80	68,08	5,21	6,78	5,20
Pulau Morotai	63,54	67,71	65,93	4,70	6,27	4,35
Pulau Taliabu	72,65	69,23	61,56	4,75	6,10	4,17
Ternate	59,88	59,58	58,90	5,80	5,70	5,77
Tidore Kepulauan	67,06	66,20	65,35	4,95	2,81	2,85
Maluku Utara	64,28	64,70	64,88	5,15	4,71	3,98

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Maluku Utara 2022, BPS Provinsi Maluku Utara

LAMPIRAN 5. Rasio Gini Provinsi Maluku Utara, 2020-2022

Kabupaten/Kota	Rasio Gini, 2020-2022		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	0,24	0,28	0,25
Halmahera Tengah	0,33	0,27	0,29
Kepulauan Sula	0,30	0,24	0,28
Halmahera Selatan	0,26	0,27	0,24
Halmahera Utara	0,28	0,27	0,23
Halmahera Timur	0,30	0,26	0,25
Pulau Morotai	0,25	0,29	0,27
Pulau Taliabu	0,25	0,25	0,24
Ternate	0,27	0,26	0,31
Tidore Kepulauan	0,26	0,25	0,24
Maluku Utara	0,31	0,30	0,28

Sumber: Tabel Dinamis Kemiskinan 2020-2022, BPS Provinsi Maluku Utara

ISTILAH TEKNIS

Air Minum Bersih

Air yang bersumber dari leding, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) ≥ 10 meter.

Angka Beban Tanggungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 5 tahun dan 66 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Harapan Hidup

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka Kematian Bayi

Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka Kesakitan

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Murni

Proporsi anak usia sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, minimal selama satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai pekerja. bekerja dianggap sebagai pekerja.

Indeks Gini

Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya

Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per km².

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja.

Masih Bersekolah

Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Pengangguran

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Pengangguran Terbuka

Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak

mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi minuman, tembakau dan sirih, bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya dan kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Pekerja tidak dibayar

Seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga rumah tangga atau bahkan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji.

Berpergian

Melakukan perjalanan pergi pulang (PP) sejauh minimal 100 Kilometer dan tidak dalam rangka mencari nafkah dan tidak dilakukan secara rutin.

Rata-rata lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Status Pekerjaan

Kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Tamat Sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapat tanda tamat ijazah.

Tidak/Belum Pernah Sekolah

Tidak atau belum pernah bersekolah disekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan sekolah.

Tidak Bersekolah Lagi

Yaitu pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

<https://malut.bps.go.id>

SUMBER DATA

1.1 SENSUS PENDUDUK

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan, Indonesia telah menyelenggarakan enam kali sensus penduduk yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020.

SP menggunakan dua tahap pencacahan; pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang ada di wilayah geografis Indonesia (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tunawisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar lima persen rumah tangga.

1.2 SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dilaksanakan setiap tahun dengan pergantian modul setiap tiga tahunan. Data pokok yang dicakup antara lain: data kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas, serta perumahan dan lingkungan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

1. Konsumsi/Pengeluaran
2. Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
3. Sosial Budaya dan Pendidikan.

1.3 SUMBER DATA LAINNYA

Selain dari sensus dan survei, Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Provinsi Maluku Utara 2021 juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi Departemen/Instansi pemerintah di luar BPS yang terangkum dalam Maluku Utara dalam Angka sebagai sumber data sekunder.

ST2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan Stadion No 65 Ternate, 97712

Telp (0921) 3127878, Fax (0921) 3126301

E-mail : bps8200@bps.go.id | Website : <http://malut.bps.go.id>

